

E B B A N K

Jurnal Ilmiah Bidang **E**konomi **B**isnis dan Perbankan

Volume 9 • Nomor 2 • Desember 2018

ISSN (Online) : 2442-4439

ISSN (Print) : 2087-1406

Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kinerja Perajin Batik pada Sentra Batik Pendowoharjo
(Human Resources Competence and Performance Analisis of Batik Crafters at Pendowoharjo Batik Center)

**Kristiana Sri Utami
Desnormasari**

Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Taofik Hidajat

Pengaruh Pengalaman Kerja dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Pemerintah D.I Yogyakarta

Muhamad Rifandi

Potret Pendanaan UMKM Berdasarkan Siklus Hidup Usaha
(Portrait of UMKM Funding Based on the Business Life Cycle)

Maria Rio Rita

Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Untuk Lembaga Pendidikan Studi pada LPIT Al-Furqan Yogyakarta
(Development of Sales Accounting Information System for Educational Institutions Study in LPIT Al-Furqan Yogyakarta)

**Edy Anan
M Sofyan Indrajaya**

Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Fleksibilitas Keuangan pada Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017
(The Influence of Risk Management Implementation on Financial Flexibility at Commercial Banks on the Indonesia Stock Exchange 2013-2017)

**Hilda Octavana Siregara
Faridiah Aghadiati Fajrib**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan
Yogyakarta**

**LP3M
STIE
BANK**

EBBANK

Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan

Volume 9 ■ Nomor 2 ■ Desember 2018

ISSN : 2442-4439 (Online)
ISSN : 2087-1406 (Print)

Editorial Staff

Editorial in Chief

Ir. A.A. Alit Merthayasa, MS.

Editors

Prof. Dr. Masyhuri Mulyono	Universitas Gadjah Mada
Dr. Eko Hariyanto, M.Si.,Akt.	Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Fifi Swandari, M.Si.	Universitas Lambung Mangkurat
Dr. Krismiaji	Akademi Akuntansi YKPN
Wahyu Andrianto, SE. M.Si, Ak., CA.	STIEBBANK

Editorial Secretary

Agus Setyowidodo, S.Sos.

Editorial Office

Kampus STIEBBANK
Jl. Magelang KM 8, Sleman, Yogyakarta
Telp. & Fax. 0274-866800
Email: stiebbank@yahoo.co.id

EBBANK merupakan jurnal yang memuat karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, dan perbankan. EBBANK diterbitkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima artikel dari para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan pihak lainnya yang tertarik pada bidang-bidang tersebut.

EBBANK

Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan

Volume 9 ■ Nomor 2 ■ Desember 2018

ISSN : 2442-4439 (Online)
ISSN : 2087-1406 (Print)

Daftar Isi

- Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kinerja Perajin Batik
Pada Sentra Batik Pendowoharjo
*Human Resources Competence and Performance Analisis of Batik Crafters
at Pendowoharjo Batik Center* Hal. 1 – 10
- *Kristiana Sri Utami*
 - *Desnormasari*
- Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Hal. 11 – 18
- *Taofik Hidajat*
- Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap
Kualitas Hasil Audit Pada Pemerintah D.I Yogyakarta Hal. 19 – 26
- *Muhamad Rifandi*
- Potret Pendanaan UMKM Berdasarkan Siklus Hidup Usaha Hal. 27- 34
- Portrait of UMKM Funding Based on the Business Life Cycle*
- *Maria Rio Ritaa*
- Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan untuk Lembaga
Pendidikan Studi pada LPIT Al-Furqan Yogyakarta Hal. 35 – 50
- Development of Sales Accounting Information System for Educational
Institutions Study in LPIT Al-Furqan Yogyakarta*
- *Edy Anan*
- Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Fleksibilitas Keuangan
Pada Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017 Hal. 51 -62
- The Influence of Risk Management Implementation on Financial Flexibility
at Commercial Banks on the Indonesia Stock Exchange 2013-2017*
- *Hilda Octavana Siregara*
 - *Faridah Aghadiati Fajrib*

Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kinerja Perajin Batik Pada Sentra Batik Pendowoharjo

Human Resources Competence and Performance Analisis of Batik Crafters at Pendowoharjo Batik Center

Kristiana Sri Utami¹
Universitas Widya Mataram

Desnormasari²
Universitas Widya Mataram

ARTICLES INFORMATION

EBBANK

Vol. 9, No. 2, Desember 2018
Halaman : 1 - 10
© LP3M STIEBBANK
ISSN (online) : 2442 - 4439
ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

*Human resources
competence, UKM
Performance, Regression
Analysis*

JEL classifications :

Contact Author :

utamisiswaya@yahoo.com.
des.normasari@yahoo.co.id

ABSTRACT

Competence and performance of business actors become an important factor for small industry development effort. Business actors with high competence and performance will be better prepared to face the challenges of global crisis. This study aims to determine the influence of human resource competence (knowledge, ability, and skill) on the performance of batik crafters at batik center Pendowoharjo, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. This research is a descriptive research by integrating qualitative and quantitative approach. Data analysis using multiple linear regression analysis. Research respondents are 14 handmade and stamps batik crafters. The majority of craftsmen aged 41-55 years. The result of analysis shows the condition of competence of batik artisans (knowledge, ability, skill) in good category. Analysis on the performance level also shows that the majority of batik crafters (85.7%) have a good category performance. The results of regression analysis and t-test can be concluded that the competence variables that significantly influence the performance of artisans is the variable ability (ability) and skill (skill). While the variables of knowledge (knowledge) have no significant effect.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Arah perkembangan ekonomi nasional dalam era ekonomi kreatif ini menuntut adanya program untuk mengembangkan UMKM industry kreatif. Melalui proses pembelajaran diharapkan usaha kecil dapat berkembang dengan lebih baik, mampu mandiri serta mampu bersaing di pasar local maupun global. Kondisi UMKM di Indonesia saat ini sebagian besar masih belum stabil, terutama yang berada pada level mikro kecil. Perkembangan usaha pada level ini masih sangat membutuhkan peran serta pihak lain agar dapat berkembang menjadi level menengah dan atas. Tantangan usaha bagi UMKM semakin berat dalam era globalisasi. Hal ini menuntut adanya langkah-langkah oleh para pengambil kebijakan agar unit-unit usaha ini tetap dapat bertahan. Salah satu langkah strategis untuk mengamankan UMKM Indonesia dari ancaman dan tantangan globalisasi adalah dengan melakukan penguatan pada berbagai aspek, salah satu diantaranya adalah aspek kompetensi.

Kompetensi pelaku usaha menjadi faktor penting bagi upaya pengembangan industry kecil. Pelaku usaha yang memiliki kompetensi akan lebih siap menghadapi tantangan krisis global. Hal ini berkaitan dengan peran UMKM bagi pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki peranan cukup besar bagi keberhasilan pembangunan ekonomi karena kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja, mengatasi masalah kemiskinan, serta kemampuannya menyediakan barang dan jasa dengan harga murah. Kompetensi SDM merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mengembangkan UMKM. Tersedianya sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi menjadi syarat utama dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional. Dengan mendasarkan pada pentingnya kompetensi SDM bagi perkembangan UMKM, peneliti ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana profil pelaku usaha pada unit usaha kerajinan batik 2). Bagaimana kondisi kompetensi SDM pelaku usaha berdasarkan faktor pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*) dan ketrampilan (*skill*)? 3) Bagaimana pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja pada unit usaha batik?

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perkembangan usaha kecil pada industry kerajinan batik. Sedangkan secara khusus tujuannya untuk mengetahui profil perajin batik, peta kondisi kompetensi SDM perajin batik dengan mendasarkan faktor ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*), serta pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja pelaku usaha batik.

Kompetensi erat kaitannya dengan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi (perusahaan). Menurut Armstrong (1994) kinerja seseorang didasarkan pada pemahaman ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan kinerja organisasi (perusahaan) didasarkan pada bagaimana manajemen perusahaan merespon kondisi eksternal dan internalnya, yang dengan tolok ukur tertentu akan dapat diketahui berapa tingkat turbelensinya dan berapa tingkat kemampuan untuk mengantisipasinya. Menurut Mathis & Jackson (2001), *competency is a base characteristic that correlation of individual and team performance achievement*. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*abilities*).

Menurut hasil penelitian Ardiana dkk tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja pelaku usaha, menunjukkan bahwa tiga variabel kompetensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*) dan (*skill*) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pelaku usaha. Guna meningkatkan kinerja UKM maka kompetensi harus selalu ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada unit usaha kecil kerajinan batik disentra batik Desa Pandowoharjo yang terletak di dusun Plalangan. Desa Pandowoharjo memiliki luas wilayah 750,75 ha ini terbagi menjadi 22 dusun yaitu Plalangan, Jabung, Gawar, Krandon, Jembulan, Majegan, Nyaen, Jetis Jogopaten, Brayut, Karangasem, Kleben Mancasan, Temon, Niron, Sawahan, Toino, Gabugan, Karangtanjung, Karangkepuh, Pajangan, Berkisan, Saragan, dan Grojogan. Desa Pandowoharjo merupakan salah satu sentra industri potensial untuk pengembangan industry kreatif di Kabupaten Sleman khususnya di bidang batik. Pada tanggal 29 September 2016 desa ini dikukuhkan menjadi Sentra Batik oleh Bupati Sleman

Metode Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh perajin batik pada sentra batik di Pendowoharjo. Metode pengumpulan data dari responden digunakan:

- a. Wawancara terstruktur.
- b. Observasi
- c. Dokumentasi
- d. Kuisioner

Definisi Konsep

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien serta sesuai dengan standar kinerja yang diisyaratkan.

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999:15). Pengertian ini mengaitkan hasil kerja dengan tingkah laku. Kinerja merupakan aktivitas tingkah laku yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. Pelaku usaha yang mempunyai kinerja tinggi memiliki beberapa karakteristik yaitu memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi, memiliki tujuan yang realistis, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya, memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. (Mangkunegara, 2002:68). Sedangkan indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas serta kemandirian.(Robbins 2006:260)

Definisi Operasional

Kompetensi SDM pelaku usaha dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga hal pokok yaitu : Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*) dan Kemampuan (*Ability*). Pengetahuan (*Knowledge*), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Indikator pengetahuan (knowledge) dalam hal ini adalah, pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi dan strategi pemasaran.Keterampilan (*Skill*), adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi suatu objek secara fisik. Indikator keterampilan meliputi: keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi.Kemampuan (*Ability*), adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Indikator kemampuan meliputi : kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi dan perubahan lingkungan bisnis.

Kinerja, adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dan merupakan sarana penentu dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas serta kemandirian.(Robbins 2006:260)

Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini dilakukan persiapan perijinan dari obyek penelitian dan instansi terkait Bappeda dan Disperindagkop Kabupaten Sleman. Disamping itu juga dilakukan penyamaan persepsi antar tim peneliti, membuat rancangan penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah serta menyusun instrument penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari suatu penelitian. Penelitian didahului dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan terstruktur terhadap para perajin batik, FGD (Focus Group Discussion), kuesioner, dokumentasi serta survey ke UMKM untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literature-literature yang berhubungan dengan UMKM, kompetensi dan kinerja SDM. Untuk mengetahui hubungan antara variable kompetensi dengan variable kinerja dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perajin

Perajin Batik pada sentra batik di Pendowoharjo terdapat 14 perajin. Usia perajin rata-rata antara 41-55 tahun sebanyak 11 perajin, sedangkan sisanya berusia diatas 56 tahun. Hal ini digambarkan dalam tabel 1.

Tabel 1.

Usia Perajin:	
1: <25 th	0
2: 25-40 th	0
3: 41-55 th	11
4: 56 -70 th	3
5 : > 70 th	0

Perajin batik ini mayoritas berlatar belakang pendidikan terakhir SMA/ sederajat sebanyak 9 orang, berlatar belakang pendidikan terakhir perguruan tinggi 2 orang, Sekolah Menengah Pertama 1 orang dan Sekolah Dasar 2 orang.

Tabel 2.

Pendidikan Terakhir	
1:Tdk sekolah	0
2:SD	2
3:SMP	1
4:SMA/ sederajat	9
5:PT	2

Perajin batik di sentra batik Pendowoharjo ini semua mengerjakan batik tulis, cap dan kombinasi. Sedangkan batik printing ataupun jumputan tidak diproduksi di sentra ini. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa perajin focus pada batik tulis, cap serta kombinasi karena ingin melestarikan batik tulis serta menghasilkan produk batik dengan kualitas yang baik.

Tabel 3.

Jenis produk	
1: Batik tulis saja	0
2: Batik cap saja	0
3: Batik printing saja	0
4: Batik jumputan	0
5: Batik tulis, cap, kor	14

Deskripsi Hasil Penelitian

a. Pengetahuan Responden

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha kerajinan batik di sentra batik Pendowoharjo dapat berpengaruh terhadap kinerjamereka. Tingkat kompetensi SDM yang terdiri dari *knowledge, skill dan ability* diuraikan pada table-table di bawah.

Tabel 4. Pengetahuan Responden

Kategori	Frequensi	Persent
Sangat Kurang	0	0
Kurang Baik	1	7.142857
Baik	11	78.57143
Sangat Baik	2	14.28571
	14	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas perajin(78,5%) memiliki kompetensi yang baik, dan bahkan ada sekitar 14,3% sangat baik serta 7,1% kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perajin batik di sentra batik Pendowoharjomemiliki pengetahuan berwirausaha yang baik. Pengetahuan ini semestinya perlu ditingkatkan sehingga nantinya perajin memiliki pengetahuan yang sangat baik.

b. Kemampuan Responden

Variabel Kemampuan merupakan indikator yang kedua dari kompetensi, dimana dalam penelitian ini hasil analisa data dari jawaban responden terhadap beberapa item pertanyaan dapat dilihat pada tabel dibawahini.

Tabel 5. Kemampuan Perajin dalam Berbisnis

Kategori	Frekuensi	Persent
Sangat Kurang	0	0
Kurang	0	0
Baik	13	92.85714
Sangat Baik	1	7.142857
	14	100

Hasil rata-rata dari jawaban responden terhadap butir pertanyaan pada variabel kemampuan ditunjukkan pada table 5. Kemampuan perajin dalam menjalankan usaha masuk dalam kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan angka 92,8%. Artinya mayoritas perajin memiliki kemampuan yang baik. Sedangkan yang masuk kedalam kategori sangat baik ada 1 responden (7,1%). Walaupun mayoritas sudah baik, tetapi kemampuan responden ini masih perlu ditingkatkan, hal ini berkaitan dengan begitu cepatnya berbagai perubahan terjadi dalam berbagai bidang, baik didalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, serta perkembangan teknologi, sehingga nantinya mayoritas perajin berada dalam kategori sangat baik.

c. Ketrampilan Responden

Ketrampilan merupakan variabel ketiga dari kompetensi. Hasil tabulasi dalam table 6 menunjukkan bahwa mayoritas perajin batik pada sentra batik Pendowoharjo memiliki ketrampilan yang baik (92,8 %). Sedangkan 7,1% perajin memiliki ketrampilan kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja perajin dalam menjalankan usaha. Ketrampilan yang dimiliki perajin senantiasa harus ditingkatkan hal ini berkaitan dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat serta persaingan yang semakin ketat. Ketrampilan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan usaha.

Tabel 6. Ketrampilan Perajin

Skill	Frekuensi	Persent
Sangat Kurang	0	0
Kurang	1	7.142857
Baik	13	92.85714
Sangat Baik	0	0
	14	100

d. Kinerja UKM

Kinerja dalam penelitian ini merupakan variable dependen (Y). Sedangkan variabel independen (X) penelitian ini yaitu Kompetensi SDM yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan. Sedangkan hasil analisa data tentang kinerja perajin batik pada sentra batik Pendowoharjo dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kinerja Perusahaan

Kinerja	Frekuensi	Persent
Sangat Kurang	0	0
Kurang	2	14,2857
Baik	12	85,7142
Sangat Baik	0	0
	14	100

Tabulasi kinerja para perajin batik di sentra batik Pendowoharjo pada table 7 menunjukkan mayoritas perajin memiliki kinerja baik, yaitu sebanyak 85,71%. Sedangkan sisanya (14,2%) kinerjanya masih kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya upaya peningkatan kinerja perajin dengan cara meningkatkan kompetensi SDM (pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan). Upaya peningkatan ini akan menjadi bekal penting bagi perajin dalam menghadapi persaingan usaha yang demikian ketat

Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independen (kompetensi) terhadap variable dependen (kinerja). Dalam penelitian ini hasil analisis regresi dapat dilihat pada table dibawah 8.

Tabel 8. Koefisien Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.256	0.157		2.932	0.015
	Knowledge	-0.134	0.134	-0.414	-1.007	0.674
	Ability	0.188	0.150	0.235	1.256	0.034
	Skill	0.362	0.392	0.441	2.925	0.028

Dari hasil analisis regresi diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 0,256 - 0,134 X_1 + 0,188 X_2 + 0,362 X_3$$

- Bilangan Konstan (a) sebesar 0,256 menunjukkan bahwa kinerja perajin batik Pendowoharjo adalah sebesar 0,256 jika perajin tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan dan Kemampuan.
- Nilai Koefisien Regresi untuk Variabel Pengetahuan (X-1) sebesar -0,134. Nilai negative ini menunjukkan bahwa perajin batik pada sentra batik Pendowoharjo dalam menjalankan bisnisnya tidak tergantung pada pengetahuan yang mereka miliki. Tanpa pengetahuan yang tinggi baik secara formal maupun informal, perajin tetap dapat melanjutkan usaha.

- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kemampuan (X-2) sebesar 0,188. Hal ini berarti bahwa apabila kemampuan ditingkatkan satu satuan maka kinerja akan meningkat sebesar 0,188. Nilai ini mengindikasikan perajin batik perlu ditingkatkan dalam kemampuan. Peningkatan kemampuan akan berdampak pada peningkatan kinerja. Dengan kinerja yang semakin baik maka perajin batik akan lebih siap untuk bersaing secara local maupun internasional.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel ketrampilan (X-3) sebesar 0,362. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila ketrampilan perajin ditingkatkan sebesar satu satuan maka kinerja perajin akan meningkat sebesar 0,362. Hal ini mengindikasikan bahwa perajin batik perlu ditingkatkan dalam ketrampilannya. Peningkatan ketrampilan ini akan meningkatkan kinerja perajin sehingga lebih siap dalam menghadapi pasar global.

Dari ke-tiga variabel X tersebut variabel ketrampilan memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan dua variabel lainnya, hal ini dapat dilihat dari hasil analisa *Standardized Koefisien Beta* yang menunjukkan angka sebesar 0,441 dimana merupakan angka yang paling besar dibandingkan dengan variabel lain seperti Kemampuan sebesar 0,235 dan Pengetahuan 0,414.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ardiana dkk yang menyimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kompetensi SDM, peningkatan kinerja pelaku usaha lebih besar dipengaruhi oleh aspek kemampuan dan aspek ketrampilan, sedangkan aspek pengetahuan tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja UKM. Kedua aspek ini perlu selalu ditingkatkan sehingga unit usaha semakin berkembang dalam zaman yang penuh tantangan.

Analisa t test

Tabel 9. Hasil uji-t

Variabel		t	Sig	alfa	Keterangan
X1	Knowledge	-1.007	0.674	0,05	Tidak signifikan
X2	Ability	2.256	0.024	0,05	Signifikan
X3	Skill	1.925	0.038	0,05	Signifikan

Hasil analisis-t pada table 9 menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh variabel pengetahuan sebesar -1,007, dengan angka signifikansi sebesar 0,674 (diatas alfa 0,05), ini berarti pengaruh variabel pengetahuan terhadap kinerja perajin batik pada sentra batik Pendowoharjo tidak signifikan karena nilai signifikansi menunjukkan angka diatas alfa 0,05. Sedangkan pengaruh variabel kemampuan menunjukkan 2,256 dengan angka signifikansi 0,024 (dibawah alfa 0,05), ini berarti variabel kemampuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perajin batik. Hasil uji-t pada variabel ketrampilan menunjukkan angka sebesar 1,925 dengan angka signifikansi sebesar 0,038 (dibawah alfa 0,05), artinya variabel ketrampilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perajin batik.

PENUTUP

Simpulan

1. Perajin batik pada sentra batik Pendowoharjo berjumlah 14 orang dengan rata-rata berusia antara 41 tahun sampai 55 tahun, dan berlatar belakang pendidikan terakhir mayoritas SLTA/ sederajat. Semua perajin pada sentra ini memproduksi batik tulis dan cap.

2. Analisis terhadap variable kompetensi menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas perajin batik memiliki Pengetahuan (knowledge), Kemampuan (ability) dan Keterampilan (skill) dalam berwirausaha dalam kategori baik. Meski demikian ketiga variable ini harus selalu ditingkatkan supaya perajin siap menghadapi tantangan dalam globalisasi.
3. Analisis terhadap kinerja menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas perajin batik (85,7%) memiliki kinerja dalam kategori baik.
4. Dari hasil analisis regresi dan uji t-test dapat disimpulkan bahwa variable kompetensi yang berpengaruh secara signifikan adalah variable kemampuan dan keterampilan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja perajin. Sedangkan variable pengetahuan berpengaruh dengan tidak signifikan, hal ditunjukkan oleh nilai negative serta nilai signifikansi diatas alfa.

Saran

Dalam kondisi globalisasi dengan perkembangan yang begitu cepat dalam berbagai bidang menuntut semua pelaku usaha untuk siap menghadapi berbagai tantangan. Kinerja yang baik dari para pelaku usaha menjadi modal besar untuk dapat bersaing dalam dunia usaha. Oleh karena itu pengetahuan, kemampuan serta keterampilan pelaku usaha harus selalu ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada, sehingga usahanya akan dapat berkembang dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ardiana, Brahmayanti , Subaedi Kompetesni SDM UKM dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UKM di Surabaya, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan vol.12 no.1 Maret 2010:42-55
- Amstrong, Mischael, 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Robbins, Stephen P., 2006. Perilaku Organisasi, PT Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- <https://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html>

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Taofik Hidajat

Program Studi Manajemen, STIE Bank BPD Jateng

ARTICLES INFORMATION

EBBANK

Vol. 9, No. 2, Desember 2018

Halaman : 11 – 18

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

pajak kendaraan bermotor, wajib pajak, ketidapatuhan

JEL classifications:

H21 H26

Contact Author :

inidotcom@yahoo.com

STIE Bank BPD Jateng

Jl.Pemuda 4A, Semarang, Indonesia

Terima kasih untuk BPPD Jawa Tengah yang telah membantu menyediakan data untuk penelitian ini.

ABSTRACT

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber pemasukan yang sangat signifikan terhadap pembangunan di Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah masih belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab ketidapatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jepara, Blora, Grobogan, Kudus, Pati dan Rembang. Sampel dalam penelitian ini adalah 360 pemilik kendaraan bermotor yang masih memiliki kendaraan bermotor atas nama sendiri wilayah di Blora, Grobogan, Jepara, Kudus, Rembang dan Pati. Melalui metode *simple random sampling* selama bulan Mei sampai dengan Juli 2017, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan pembayaran pajak di eks karesidenan Pati disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal, yaitu faktor yang diakibatkan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu tidak disengaja (lupa) dan disengaja (belum memiliki dana, belum ada waktu, kendaraan akan dijual, kendaraan jarang dipakai, usia kendaraan sudah tua, kendaraan sudah rusak, kendaraan berada di luar kota, kendaraan dipinjam pihak lain, tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dan kendaraan sedang digadaikan), sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang diakibatkan oleh bukan wajib pajak yaitu lokasi pelayanan yang dianggap jauh.

Motor Vehicle Tax is one of the most significant sources of income for developmental financing in Central Java Province. However, the level of tax compliance by motor vehicle owners was not optimal. This research was conducted to determine the influencing factors of their non-compliance. The samples were 360 motor vehicle owners domiciled in Jepara, Blora, Grobogan, Kudus, Pati and Rembang and they still owned them until the present. Through simple random sampling method applied during May to July 2017, the results indicated that the cause of late tax payment in Pati was caused by two factors, both internally and externally. Some internal factors caused by tax payers themselves namely forgetful and it was not done by them in purpose. Second internal factors were done intentionally (because of lacking of funds, having no time, willingness to sell, rare use, old age, damage, being out of town, being borrowed by other parties, absence of inspection on the road and being mortgaged). While some external factors were caused uncontrollable factors by taxpayers namely far locations from home.

PENDAHULUAN

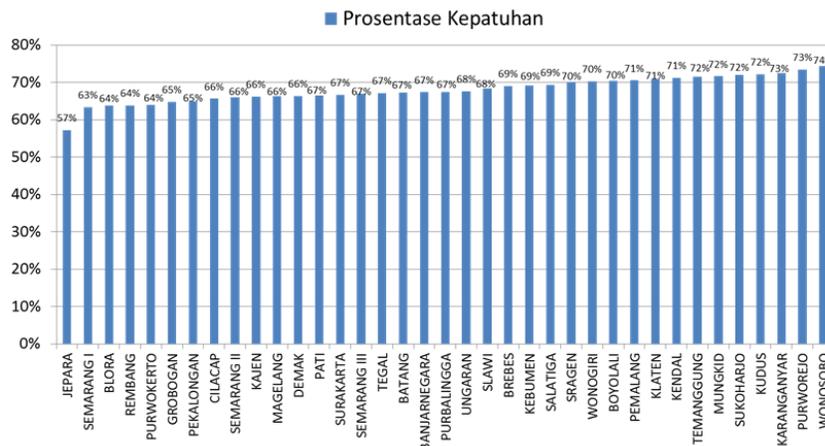
Pajak adalah pungutan wajib negara kepada rakyat yang menjadi salah satu sumber utama danabagi pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai pembangunan.Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang terus membangun juga tidak lepas dari kebutuhan terhadap pajak. Selain Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu sumber pemasukan yang memiliki peran sangat signifikan terhadap pembangunan.

Kondisi perekonomian yang kian membaik dan membuat daya beli kendaraan bermotor meningkat membuat potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor ikut meningkat. Namun demikian, potensi penerimaan pajak yang besar ini juga harus diimbangi dengan kepatuhan dari wajib pajak.

Menurut Trivedi, Shehata, & Lynn (2003), faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*). Senada dengan Trivedi dan Lynn, Chau & Leung (2009) juga berpendapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di suatu negara akan mempengaruhi penerimaan pajak. Semakin patuh (tidak patuh) wajib pajak, semakin besar (kecil) potensi penerimaan pajak yang akan diterima.

Di provinsi Jawa Tengah, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal. Data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (2017)menunjukkan bahwa terdapat 5 wilayah yang memiliki tingkat kepatuhan rendah yaitu Jepara, Semarang I, Blora, Rembang dan Purwokerto serta 5 wilayah yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi yaitu Wonosobo, Purworejo, Karanganyar, Kudus dan Sukoharjo.

Gambar 1. Prosentase Kepatuhan Pembayaran PKB di 37 UPPD Jawa Tengah



Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (2017)

Temuan tersebut yaitu ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan gambaran bahwa masih terdapat permasalahan sekaligus potensi perpajakan yang harus segera dicarikan solusinya. Namun demikian, temuan tersebut belum dapat menunjukkan faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yaitu mengidentifikasi faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di eks Karesidenan Pati yaitu di Kabupaten Pati, Jepara, Blora, Rembang, Grobogan dan Kudus. Menurut Andreoni, Erard, & Feinstein (1998), dengan memahami pengelompokan pola dan perilaku ketidakpatuhan perpajakan wajib pajak, otoritas dapat menemukan cara untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan.

METODE

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili (memiliki KTP) di eks Karesidenan Pati yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor atas nama sendiri dan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut sebelum atau pada saat jatuh tempo. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 360 orang dari Blora, Grobogan, Jepara, Kudus, Rembang dan Pati masing-masing sebanyak 70, 61, 67, 51, 62 dan 49 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* (acak sederhana) dari daftar wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dari BPPD Jawa Tengah. Alat yang digunakan untuk memilih sampel adalah dengan membuat angka acak melalui *Microsoft Excel*.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

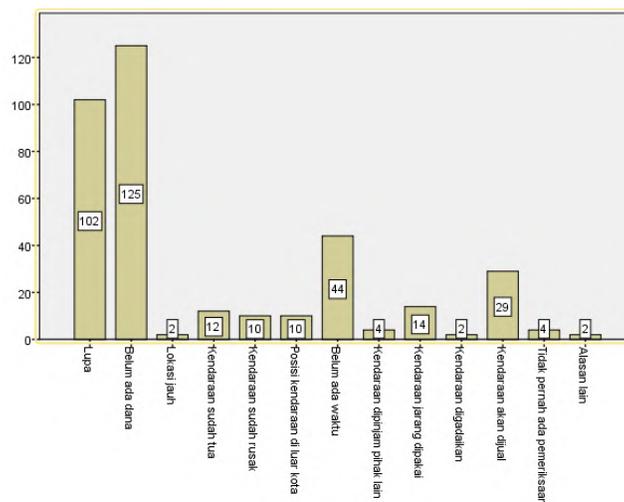
Pengumpulan data dilakukan secara primer yaitu melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Kegiatan wawancara dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan Juli 2017 yang dilakukan oleh petugas lapangan (mahasiswa) yang tinggal di wilayah penelitian. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk memberi gambaran atau karakteristik data (Hidayat & Istiadah, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pajak

Berdasarkan jawaban dari seluruh responden diperoleh jawaban bahwa faktor penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah karena belum memiliki dana (125), lupa (102), belum ada waktu (44), kendaraan akan dijual (29), kendaraan jarang dipakai (14), usia kendaraan sudah tua (12), kendaraan sudah rusak (10), kendaraan berada di luar kota (10), kendaraan dipinjam pihak lain (4), tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan (4), lokasi pelayanan yang jauh (2), kendaraan digadaikan (2) dan alasan lainnya (2).

Gambar 2 Penyebab Keterlambatan Pembayaran PKB



Sumber: data diolah

Dari jawaban tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih banyak disebabkan karena faktor internal dari wajib pajak terutama akibat belum ada dana dan lupa. Satu-satunya faktor eksternal yang menjadi penyebab keterlambatan adalah berupa lokasi layanan pembayaran pajak yang jauh. Secara umum, profil dari wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah seperti dalam matriks berikut.

Gambar 3 Profil Wajib Pajak dan Alasan Keterlambatan Pembayaran PKB

		Lupa	Belum ada dana	Lokasi jauh	Kendaraan sudah tua	Kendaraan sudah rusak	Posisi kendaraan di luar kota	Belum ada waktu	Kendaraan dipinjam pihak lain	Kendaraan jarang dipakai	Kendaraan digadaikan	Kendaraan akan dijual	Tidak pernah ada pemeriksaan	Alasan lain
@3.Wilayah	Blora	10	18	3	1	1	4	18	2	2	1	13	0	1
	Grobogan	20	16	0	5	5	6	2	1	5	1	0	0	0
	Jejara	3	50	1	3	4	0	1	0	1	0	3	0	1
	Kudus	32	3	0	0	0	0	9	0	2	0	5	0	0
	Rembang	24	23	0	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0
	Pati	13	15	0	3	0	0	1	1	2	0	10	4	0
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2
@6.Pendidikan	Tidak tamat SD	4	3	0	3	1	1	0	0	2	0	1	0	0
	SD/ sederajat	14	41	0	5	0	4	3	0	1	1	4	0	2
	SMP/ sederajat	12	28	0	2	1	2	8	1	6	0	6	1	0
	SMA/ sederajat	55	47	2	2	6	2	17	2	4	1	15	3	0
	Perguruan Tinggi	17	6	0	0	2	1	16	1	1	0	3	0	0
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2
@7.Pekerjaan	Pegawai swasta	27	19	0	0	1	1	8	0	2	0	0	0	0
	PNS	6	1	0	0	0	2	6	1	0	0	1	0	0
	TNI/ Polri	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Pedagang/ wiraswasta	42	33	2	4	2	3	26	1	5	1	11	2	0
	Petani	12	20	0	5	1	2	0	1	4	1	4	2	2
	Nelayan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pekerjaan lainnya	14	51	0	3	4	3	3	1	2	0	7	0	0
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2
@8.Pendapatan	Penghasilan tetap	41	22	1	0	5	3	27	1	3	0	7	1	0
	Penghasilan lain selain penghasilan tetap	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	1
	Tidak memiliki penghasilan tetap	54	101	1	12	5	5	13	3	9	2	21	3	1
	Sumber lain	7	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0
	102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2	
@10.Rata2Penghasilan	Kurang dari Rp.3 juta	65	110	2	11	7	4	16	2	11	2	19	2	1
	Rp.3 juta s.d Rp.6 juta	28	13	0	1	3	5	13	1	1	0	7	1	0
	Rp.6.1 juta s.d Rp.9 juta	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	Rp.9.1 juta s.d Rp.12 juta	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	Diatas Rp.12 juta	7	2	0	0	0	0	15	0	1	0	2	0	1
		102	125	2	12	10	10	44	4	14	2	29	4	2

Mayoritas tempat tinggal penunggak pajak sesuai dengan alasan keterlambatan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

- Jepara = Belum memiliki dana, Lokasi pelayanan yang jauh & alasan lainnya.
- Kudus = Lupa.
- Blora = Belum ada waktu, Kendaraan akan dijual, Kendaraan dipinjam pihak lain, kendaraan digadaikan, Lokasi pelayanan yang jauh & alasan lainnya.
- Grobogan = Kendaraan jarang dipakai, Usia kendaraan sudah tua, Kendaraan sudah rusak, kendaraan digadaikan dan berada di luar kota.
- Pati = tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan.

Faktor penyebab utama terlambat membayar pajak lebih banyak dikarenakan belum memiliki dana akibat faktor ekonomi karena mayoritas profesi atau pekerjaan responden yang belum memiliki dana adalah kategori pekerjaan lainnya (sopir, satpam, pekerja tidak tetap, dll) yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan penghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan dan berpendidikan SMA/ sederajat. Dikarenakan masih ada kebutuhan lain yang dirasa lebih mendesak terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan, membayar pajak belum menjadi prioritas bagi sebagian besar orang di eks Karesidenan Pati terutama di Jepara.

Hampir seluruh responden juga tidak memiliki cara yang dilakukan untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor selain dengan mengingatnya saja sehingga lupa membayar pajak menjadi faktor penyebab kedua. Mayoritas profesi atau pekerjaan responden yang belum memiliki dana adalah kategori pedagang/ wiraswasta di Kudus yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan penghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan. Mayoritas pendidikan mereka yang lupa membayar pajak adalah SMA/ sederajat.

Faktor penyebab lainnya adalah belum ada waktu karena banyak kesibukan. Mayoritas wajib pajak yang belum ada waktu untuk membayar pajak tinggal di Blora, pekerjaan pedagang/ wiraswasta, tidak memiliki pendapatan tetap dengan penghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan serta berpendidikan SMA/ sederajat & Perguruan Tinggi.

Kendaraan akan dijual menjadi alasan mayoritas wajib pajak di Blora, pekerjaan sebagai pedagang/ wiraswasta, pendidikan SMA/ sederajat, tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta untuk tidak membayar pajak tepat waktu. Dengan menjual kendaraan tersebut, wajib pajak berharap kewajiban pajak yang harus dibayar akan menjadi tanggung jawab dari pembeli kendaraan tersebut. Kendaraan yang jarang dipakai di Grobogan milik pedagang/ wiraswasta berpendidikan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan menjadi salah satu alasan ketidaktepatan pembayaran pajak.

Bagi wajib pajak dengan profesi petani yang berpendidikan SD/ sederajat di Grobogan, kendaraan yang sudah tua adalah salah satu penyebab pajak tidak dibayarkan tepat waktu. Mereka tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan. Mereka lebih memilih memiliki kendaraan yang sudah tua karena penggunaannya lebih banyak digunakan untuk ke sawah. Membayar pajak untuk kendaraan yang sudah tua dianggap tidak perlu karena dalam kurun waktu yang tidak lama, kendaraan tersebut akan menjadi rusak tidak berguna. Kendaraan yang sudah rusak milik pedagang/ wiraswasta dan pegawai negeri sipil yang berpendidikan SMA/ sederajat, tidak dan memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta di Grobogan menjadi penyebab keterlambatan pembayaran pajak. Membayar pajak untuk kendaraan yang sudah rusak dianggap tidak perlu karena kendaraan sudah tidak memiliki nilai manfaat. Posisi kendaraan di luar kota juga menjadi salah satu penyebab para pedagang/ wiraswasta berpendidikan SD/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta di Grobogan untuk tidak membayar pajak tepat waktu.

Di Blora, kendaraan yang sedang dipinjam pihak lain menjadi alasan pedagang/ wiraswasta berpendidikan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan untuk tidak membayar pajak tepat waktu. Di Pati, terlambat membayar pajak karena tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dijadikan alasan oleh pedagang/ wiraswasta dan petani berpendidikan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan.

Lokasi pembayaran yang jauh menjadi penyebab wajib pajak di Blora dan Jepara tidak membayar pajak tepat waktu. Mereka adalah pedagang/ wiraswasta yang berpendidikan SMA/ sederajat, tidak dan memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta. Bagi pedagang/ wiraswasta dan petani di Grobogan dan Blora berpendidikan SD/ sederajat dan SMA/ sederajat yang tidak memiliki pendapatan tetap dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta per bulan, kendaraan yang dimiliki sedang digadaikan di pihak lain sehingga mereka tidak membayar pajak tepat waktu. Apabila kendaraan tersebut bisa ditebus kembali, pelunasan pajak akan dilakukan kemudian. Namun apabila tidak berhasil ditebus atau kepemilikan kendaraan tersebut tidak dikuasai lagi, kewajiban pajak kendaraan tersebut diharapkan akan menjadi kewajiban pihak lain yang menguasai kendaraan tersebut.

Pembahasan

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua otoritas pajak, termasuk ketidakpatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor. Namun sebenarnya, ketidakpatuhan tersebut adalah sesuatu yang 'wajar' mengingat wajib pajak pada dasarnya tidak suka membayar pajak.

Witte & Woodbury (1985) menemukan bahwa audit pajak dan sanksi atau denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak merupakan motivator utama dari kepatuhan wajib pajak. Helhel & Ahmed (2014) yang melakukan penelitian di Yaman menyimpulkan bahwa pajak yang rendah dan sistem pajak yang fair adalah penyebab utama kepatuhan terhadap pajak. Kedua pendapat ini melihat faktor kepatuhan pajak berasal dari sisi eksternal wajib pajak.

Pandangan yang berbeda dinyatakan oleh Alm & Torgler (2006) yang melihat faktor kepatuhan ini berasal dari sisi internal wajib pajak. Menurut mereka, motivasi dari dalam diri seseorang (intrinsik) untuk membayar pajak (*tax morale*) dan ketaatan beribadah adalah faktor penentu kepatuhan pajak. *Tax morale* itu sendiri berhubungan dengan *trust*. Hasil risetnya menunjukkan bahwa sistem pajak yang dianggap transparan membuat wajib pajak di Amerika merupakan wajib pajak yang paling patuh membayar pajak dibandingkan dengan 14 negara Eropa yang lain. Organisasi keagamaan juga turut berperan positif dalam membentuk *tak morale*. Mereka yang taat beribadah cenderung lebih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Pendapat ini memberikan gambaran bahwa memahami perilaku individu adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penunggak pajak kendaraan bermotor di eks karesidenan Pati adalah pedagang atau wiraswasta skala kecil dan terutama tinggal di Jepara. Pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang tidak memberikan kepastian penghasilan dimana penghasilan yang diterima dari profesi tersebut adalah kurang dari Rp 3 juta per bulan. Kondisi ini yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak di eks karesidenan Pati mayoritas diakibatkan oleh ketersediaan dana yang belum ada pada saat harus melakukan pembayaran pajak. Akibat dana yang terbatas, mereka lebih memilih untuk menggunakan dana yang ada untuk memenuhi kebutuhan primer lain yang dianggap lebih penting. Terlebih lagi, mereka tidak mengetahui konsekuensi atau sanksi denda akibat keterlambatan tersebut karena 98,61% wajib pajak tidak mengetahui perihal sanksi atau denda keterlambatan. Namun demikian, perilaku tidak membayar pajak tepat waktu akibat ketiadaan dana sebenarnya merupakan suatu tindakan kesengajaan, yaitu sengaja tidak membayar pajak tepat waktu karena lebih memprioritaskan kebutuhan lain. Mereka tahu ada kewajiban membayar pajak namun mengabaikan kewajiban tersebut.

Jenis kelamin laki-laki dan usia rata-rata penunggak pajak yang berusia 41,82 tahun juga menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih dalam usia produktif dan seharusnya dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan. Dengan pendidikan mayoritas wajib pajak adalah SMA/ sederajat, mereka seharusnya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk dapat mengelola keuangan keluarga, salah satunya adalah kemauan untuk menyisihkan penghasilan yang diterima setiap bulan untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada saat jatuh tempo. Mereka juga masih menyukai cara atau tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor secara 'konvensional' yaitu melalui kantor Samsat. Padahal, ada alternatif pembayaran dengan cara atau di tempat lain yang relatif lebih cepat.

Meskipun memiliki perilaku sengaja terlambat membayar pajak, namun mayoritas lama keterlambatan pajak kendaraan terutama kendaraan bermotor roda dua adalah selama 1 tahun. Setelah itu, wajib pajak akan membayar pajak yang terlambat dan hanya sebagian kecil yang tetap akan membiarkan keterlambatan pajak tersebut lebih dari 1 tahun.

Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap perilaku kesadaran pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung akan taat pajak, dan sebaliknya, karena mengetahui sanksi yang akan diterima apabila tidak menaati peraturan pajak yang berlaku. Namun dalam penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak di eks karesidenan Pati ini, hal tersebut tidak berlaku. Wajib pajak di wilayah ini memiliki pengetahuan yang cukup namun tidak taat dalam membayar pajak.

Mayoritas wajib pajak hanya mengetahui hal-hal yang mudah diketahui atau mudah diingat mengenai pajak yaitu jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan, prosedur pembayaran pajak, dokumen kelengkapan pajak dan tempat pembayaran pajak. Mereka tidak mengetahui hal-hal yang cenderung rumit seperti komponen perhitungan pajak dan jumlah sanksi pembayaran keterlambatan pajak meskipun informasi tersebut sebenarnya dapat diperoleh dengan mudah. Mereka juga punya kecenderungan menyepelkan hal yang sederhana namun penting yaitu jatuh tempo pembayaran pajak.

Terkait dengan informasi atau pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, lembaga resmi merupakan tempat yang paling banyak menjadi sumber informasi bagi wajib pajak. Dengan demikian, lembaga resmi memiliki tugas yang lebih banyak dibandingkan dengan sumber informasi lain dalam menyampaikan informasi tentang pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Selain lembaga resmi, individu yang memiliki pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor dan media massa juga sebaiknya ikut dilibatkan dalam penyebaran informasi pajak.

Secara umum, persepsi wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak dan penggunaan hasil pungutan pajak adalah positif atau baik. Persepsi yang baik semestinya membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Torgler, Demir, Macintyre, & Schaffner (2008) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak berhubungan dengan persepsi akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak sebenarnya mengetahui bahwa membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan akan digunakan untuk pembangunan. Dengan kondisi jalan, penerangan/ listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan transportasi/ kendaraan yang baik, wajib pajak sebenarnya menyadari bahwa pajak yang dibayarkan sudah direalisasikan dalam bentuk pembangunan di wilayah tempat tinggal mereka.

Wajib pajak juga sebenarnya memiliki norma pajak yang baik karena menganggap membayar pajak adalah bagian dari kewajiban dalam agama. Mereka juga menyatakan tinggal di keluarga dan lingkungan yang memiliki perilaku taat terhadap agama dan peraturan. Fasilitas dan pelayanan pembayaran PKB berupa jumlah titik pelayanan pembayaran pajak, fasilitas pembayaran pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kualitas pelayanan petugas bukan merupakan masalah bagi wajib pajak karena sudah dianggap memuaskan. Transparansi jumlah pajak, persyaratan dan prosedur pembayaran, jumlah sanksi keterlambatan dan kebijakan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor juga tidak memiliki masalah karena wajib pajak menganggap sudah transparan.

PENUTUP

Simpulan

Persepsi yang positif terhadap pajak, norma wajib pajak yang baik, fasilitas dan pelayanan yang memuaskan dan transparansi perpajakan ternyata tidak diiringi dengan kepatuhan terhadap pajak. Penyebab keterlambatan pembayaran pajak di eks karesidenan Pati disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang diakibatkan oleh wajib pajak itu sendiri.
 - a. Tidak disengaja, yaitu lupa tidak membayar pajak tepat waktu.
 - b. Disengaja, yaitu belum memiliki dana, belum ada waktu, kendaraan akan dijual, kendaraan jarang dipakai, usia kendaraan sudah tua, kendaraan sudah rusak, kendaraan berada di luar kota, kendaraan dipinjam pihak lain, tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dan kendaraan sedang digadaikan.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang diakibatkan oleh bukan wajib pajak yaitu lokasi pelayanan yang dianggap jauh.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan wajib pajak, dapat diperoleh gambaran bahwa pembayaran pajak yang tidak tepat waktu lebih banyak disebabkan oleh faktor internal wajib pajak yaitu perilaku yang sengaja menunda membayar pajak. Wajib pajak sebenarnya mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban yang harus dibayar namun sengaja mengabaikan hal tersebut.

Saran

Wajib pajak yang belum memiliki dana seharusnya menyisihkan dana setiap bulan agar memiliki dana pada saat jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak yang belum memiliki waktu seharusnya mampu mengatur waktu untuk melakukan pembayaran, terlebih lagi bahwa pembayaran pajak kendaraan juga bisa dilakukan secara online. Penyebab lain yaitu kendaraan akan dijual, kendaraan jarang dipakai, usia kendaraan sudah tua, kendaraan sudah rusak, kendaraan berada di luar kota, kendaraan dipinjam pihak lain, tidak pernah ada pemeriksaan kendaraan di jalan dan kendaraan sedang digadaikan tidak semestinya dijadikan alasan terlambat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860.
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah. (2017). *Paparan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah*.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34.
- Helhel, Y., & Ahmed, Y. (2014). Factors affecting tax attitudes and tax compliance: a survey study in Yemen. *European Journal of Business and Management*, 6(22), 48–58.
- Hidayat, T., & Istiadah, N. (2011). Panduan lengkap menguasai SPSS 19 untuk mengolah data statistik penelitian. *Jakarta: Mediakita*.
- Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation. *Economic Analysis and Policy*, 38(2), 313–339.
- Trivedi, V. U., Shehata, M., & Lynn, B. (2003). Impact of personal and situational factors on taxpayer compliance: An experimental analysis. *Journal of Business Ethics*, 47(3), 175–197.
- Witte, A. D., & Woodbury, D. F. (1985). The effect of tax laws and tax administration on tax compliance: The case of the US individual income tax. *National Tax Journal*, 1–13.

Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Pemerintah D.I Yogyakarta

Muhamad Rifandi
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION

EBBANK

Vol. 9, No. 2, Desember 2018
Halaman : 19 - 26
© LP3M STIEBBANK
ISSN (online) : 2442 - 4439
ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

*Pengalaman Kerja, Tekanan
Anggaran Waktu, Kualitas Hasil
Audit, Auditor Pemerintah*

JEL classifications :

Contact Author :

muhamadrifandi@unisayogya
.ac.id

ABSTRACT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman auditor dalam melakukan penugasan audit dan sikap auditor atas anggaran waktu yang disediakan pada auditor yang ada di BPK RI perwakilan DIY dan Inspektorat Pemprov DIY. Penelitian ini menggunakan data primer, dimana responden diminta untuk mengisi kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit dan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif atas kualitas hasil audit.

PENDAHULUAN

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good government governance* di Indonesia oleh banyak pihak.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens *dkk.*, 2004). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Pengalam Auditor dalam melakukan audit sangat penting, mengingat Auditor yang belum berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Hal lainnya adalah Tekanan anggaran waktu merupakan gambaran normal dari sistem pengendalian auditor. Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara konsisten berhubungan dengan situasi disfungsional. Tekanan anggaran waktu yang secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional merupakan ancaman langsung dan serius terhadap kualitas audit.

Untuk tahun anggaran 2014, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Sleman mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kulonprogo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (<http://www.jogjakota.go.id>). Akan tetapi di sisi lain masih terdapat temuan atas beberapa proyek dan pelayanan pemerintah daerah oleh BPK.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh pengalaman kerja dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas hasil audit pada pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hasil audit pada pemerintah daerah yang dilihat dari pengalaman auditor dan tekanan anggaran waktu.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu peneliti membagi kuesioner kepada responden lalu hasilnya diolah menggunakan aplikasi SmartPLS untuk mencapai tujuan penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk melihat kualitas hasil audit pemerintah daerah dari pengalaman dan tekanan anggaran waktu auditor dalam melakukan penugasan audit.

Subjek dan Obek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah auditor pemerintah yang ada di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Inspektorat Propinsi D.I Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Inspektorat Propinsi D.I Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Dan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner yang dikirim langsung kepada responden. Auditor yang menjadi sampel, akan dikirim kuesioner yang berisi kumpulan pertanyaan tentang pengalaman kerja, tekanan anggaran waktu dan kualitas audit.

Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Uji Validitas

Untuk menaksir validasi item pernyataan, penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Suatu *instrument* dikatakan valid kalau *loading factor* harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2011).

Uji Reliabilitas

Peneliti melakukan uji reliabilitas konstruk dengan menampilkan nilai *composite reliability*, *Average Variance Extracted* (AVE) dan membandingkan nilai akar AVE dengan nilai korelasi antar konstruk. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan andal (*reliable*) apabila *composite reliability* memiliki nilai di atas 0.80 dan nilai AVE di atas 0.50 (Ghozali, 2011).

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian ini dilakukan dengan melihat output dengan bantuan program aplikasi smartPLS. Jika nilai t -hitung $>$ t -tabel (1.99), pada taraf signifikansi 5% maka diterima atau signifikan. Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R-square (R^2) antara satu dan nol, dimana nilai R-square (R^2) yang mendekati satu memberikan persentase pengaruh yang besar (Ghozali, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Pada penelitian ini, memiliki dua lokasi penelitian yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan D.I Yogyakarta dan Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) D.I Yogyakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan D.I Yogyakarta merupakan perwakilan BPK RI Pusat yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pada lembaga negara yang ada di daerah hukum provinsi D.I Yogyakarta dan termasuk di dalamnya terdapat 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) D.I Yogyakarta merupakan lembaga tingkat provinsi yang tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Validitas item pertanyaan secara individu dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. Valid atau tidaknya suatu pertanyaan dilihat dari *loadings factor* yang seharusnya lebih besar dari 0.50. Adapun hasil uji menggunakan aplikasi SmartPLS sebagai berikut:

Tabel 4.3 Nilai *Loadings Factor* Item Pertanyaan

	KHA	PK	TAW
KHA1	0,937440		
KHA2	0,940827		
KHA3	0,965787		
KHA4	0,910526		
KHA5	0,963369		
KHA6	0,965555		
KHA7	0,558101		
KHA8	0,792351		
KHA9	0,798870		
KHA10	0,951627		
PK1		0,806708	
PK2		0,800522	
PK3		0,772420	
PK4		0,681630	
PK5		0,800522	
PK6		0,791325	
PK7		0,836553	
PK8		0,791325	
TAW1			0,704718
TAW2			0,709909
TAW3			0,783845
TAW4			0,709909
TAW5			0,704718

Sumber: data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, tampak bahwa semua nilai *loading factor* diatas 0.50, yang bearti menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan secara individu adalah valid.

Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabel atau tidak suatu instrumen penelitian dapat dinilai dari *composite reliability*, *Average Variance Extracted* (AVE) dan membandingkan nilai akar AVE dengan nilai korelasi antar konstruk.

Tabel 4.4 Composite Reliability dan AVE

	Composite Reliability	AVE	Akar (\sqrt) AVE
KHA	0,973129	0,786921	0,887086
PK	0,928148	0,618239	0,786282
TAW	0,845559	0,523122	0,723272

Sumber: Data primer diolah 2017

Keterangan:

KHA = Kualitas Hasil Audit

PK = Pengalaman Kerja

TAW = Tekanan Anggaran Waktu

Reliabilitas yang baik mensyaratkan bahwa nilai *composite reliability* di atas 0.80 dan nilai AVE di atas 0.50. Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik, karena nilai *composite reliability* > 0.80 dan nilai AVE > 0.50. Nilai discriminant validity dapat dilihat dengan membandingkan nilai *square root* AVE dengan korelasi antar konstruk. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki *discriminate validity* yang tinggi, karena nilai akar AVE lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk.

Evaluasi model struktur (Inner Model)

Setelah model yang diperkirakan sudah memenuhi kriteria outer model, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural menampilkan R Square (R^2) pada konstruk:

Tabel 4.5. R Square Value untuk model Kualitas Hasil Audit

	R Square
KHA	0,468994
PK	
TAW	

Sumber: data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R-Square untuk variabel kualitas hasil audit adalah sebesar 0.469, yang artinya variabel konstruk kualitas hasil audit (KHA) dijelaskan oleh konstruk pengalaman kerja (PK) dan tekanan anggaran waktu (TAW) adalah sebesar 46,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk-konstruk lain yang tidak masuk dalam penelitian ini sebesar 53,1%.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dan hubungan antar variabel dapat dilihat hasil *path coefficients* berikut ini:

Tabel 4.6. Path Coefficients dan T-Value dalam Kualitas Hasil Audit

Hipotesis	Path	Path Coefficients	T Statistics	Keterangan
H1	PK > KHA	0,396694	3,641290	Didukung
H2	TAW > KHA	0,570401	5,530241	Didukung

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas, semua variabel t-value > t-tabel (1.99) yang menunjukkan bahwa hipotesis tersebut didukung. Penjelasan lebih lanjut di pembahasan.

A. Pembahasan

Berikut pembahasan atas hasil yang telah diuji pada penelitian ini:

Pengujian hipotesis 1 (pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit)

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Pada tabel 4.6 dan gambar 4.1 di atas, hubungan antara pengalaman kerja (PK) terhadap kualitas hasil audit (KHA) memiliki nilai *path coefficient* sebesar 0,396694 dan *t-value* sebesar 3,641290. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *t-value* (3,641290) > t-tabel (1.99), hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung.

Variabel pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah, artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Dari hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil audit yang dilakukan. Hasil penelitian ini di dukung oleh beberapa peneliti, yaitu: Nataline (2007) dalam Maburri dan Winarna (2010), Alim dkk (2007), Elfarini (2007), dan Maburri dan Winarna (2010).

Pengujian hipotesis 2 (tekanan anggaran waktu terhadap kualitas hasil audit)

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa tekanan anggaran berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. Pada tabel 4.6 dan gambar 4.1 di atas, hubungan antara tekanan anggaran waktu (TAW) terhadap kualitas hasil audit (KHA) memiliki nilai *path coefficient* sebesar 0,570401 dan *t-value* sebesar 5,530241. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *t-value* (5,530241) > t-tabel (1.99), hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung.

Variable tekanan anggaran waktu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah, artinya hipotesis keenam dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Azad dalam Akmal (2010) yang menyakaan bahwa bahwa kondisi yang tertekan (secara waktu), auditor cenderung berperilaku disfungsional, misal terlalu percaya kepada penjelasan dan presentasi klien, serta gagal menginvestigasi isu-isu relevan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan laporan audit dengan kualitas rendah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit, karena semakin berpengalaman seorang auditor maka akan semakin mudah melakukan audit sehingga kualitas hasil audit pun menjadi baik.
2. Tekanan anggaran berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit, karena seorang auditor akan merasa terburu-buru dengan batasan anggaran waktu yang ada, sehingga terkesan melakukan pemeriksaan seadanya sehingga menghasilkan kualitas audit yang kurang baik.

Saran

Banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga dipandang perlu peneliti memberikan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Menambah variabel yang relevan, mengingat dua variabel independen ini hanya mampu menjelaskan 46,9% dari konstruk yang ada.
2. Memperluas obyek penelitian, karena keterbatasan jumlah auditor pada lembaga Negara yang memiliki tugas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga mengakibatkan jumlah responden masih terbilang sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Ahmad., 2010. Skripsi. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Etika Auditor Sebagai variabel Moderasi. FE UMY.
- Arens, Alvin A., Randal J.E dan Mark S.B. 2004. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu*. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I, (2006) “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, *Penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2005) “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”.
- Mabruri dan Winarna. 2010. *Jurnal*. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. SNA XIII. Purwokerto.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. Kode Etik dan Standar Audit . Edisi Keempat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Potret Pendanaan UMKM Berdasarkan Siklus Hidup Usaha

Portrait of UMKM Funding Based on the Business Life Cycle

Maria Rio Rita^a

Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 9, No. 2, Desember 2018

Halaman : . 27 - 34

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

. content, formatting, article.

JEL classifications :

M13 M20 M21

Contact Author :

^a maria.riorita@staff.uksw.edu

ABSTRACT

Fenomena UMKM masih tetap menarik untuk dibahas, terutama dari perspektif keuangannya. Salah satu keputusan keuangan yang penting bagi suatu usaha adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini nanti akan berlanjut pada keputusan investasi maupun operasionalisasi bisnis sehari-hari. Riset ini dilakukan di UMKM batik yang berlokasi di Lasem, Kabupaten Rembang-Jawa Tengah. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, terpilih 30 pengusaha sebagai responden. Penyebaran kuesioner dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Data tersebut diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi pola pendanaan UMKM berdasarkan siklus hidupnya. Hasilnya menemukan bahwa terdapat perbedaan pola sumber pendanaan yang digunakan oleh UMKM tersebut baik dibandingkan secara cross section maupun time series. Studi ini memiliki implikasi terapan bahwa penggunaan model siklus hidup perusahaan dapat membantu UMKM memahami bagaimana keputusan pembiayaannya harus disesuaikan seiring perubahan waktu.

The phenomenon of MSMEs is still interesting to discuss, especially from a financial perspective. One of the important financial decisions for a business is a financing decision. This decision will continue on investment decisions and the operationalization of daily business. This research was conducted at the batik UMKM located in Lasem, Rembang, Central Java. The sample selection process was conducted by purposive sampling method, 30 entrepreneurs were selected as respondents. The distribution of questionnaires and interviews was conducted to collect primary data. The data is processed using a qualitative descriptive method to describe the condition of MSME funding patterns based on their business life cycle. The results found that there were differences in the pattern of funding sources used by these MSMEs, both in cross section and time series. This study suggests a practical use of the firm life cycle model in helping MSME to understand how their financial decision is likely to adjust over time.

PENDAHULUAN

Kebutuhan dana sebagai modal usaha tidak dapat dipungkiri merupakan suatu sumber daya yang krusial bagi perusahaan, tidak terkecuali bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut merupakan pendukung untuk operasional sehari-hari maupun memenuhi kebutuhan investasi yang bersifat jangka panjang. Beberapa riset terdahulu mendokumentasikan bahwa masalah keterbatasan dana akan berdampak negative terhadap tumbuh kembangnya suatu usaha (Edewor, Imhonopi, & Amusan, 2014; Xiao, 2011). Sebaliknya, kecukupan permodalan akan memperkuat inovasi dan proses bisnis suatu usaha (Farkas, 2016). Bahkan Rita, Wahyudi, and Muharam (2017) menyatakan bahwa modal dipandang oleh pengusaha UKM sebagai suatu anteseden untuk memulai bisnis. Dana dianggap sebagai sumber daya yang mutlak harus tersedia untuk memulai suatu usaha, tanpa ada dana maka tidak akan muncul peluang usaha.

Salah satu masalah klasik yang kerap dihadapi UMKM yaitu kendala permodalan, di mana hal tersebut ditengarai menjadi penyebab kurang berkembangnya usaha ini. Padahal, UMKM menyimpan potensi besar terlebih bagi perekonomian suatu negara, bahkan terbukti mampu bertahan ketika suatu negara diterpa krisis ekonomi (Shinozaki, 2014). Mayoritas sumber daya UMKM yang berasal dari lokal/non impor seperti bahan baku, tenaga kerja bahkan permodalan justru membuatnya mampu bertahan di tengah gempuran krisis moneter (Shinozaki, 2014).

Meski tidak dapat dipungkiri bahwa dana/modal itu sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan untuk memutar roda bisnisnya. Meskipun demikian, kebutuhan pendanaan bagi setiap perusahaan berbeda-beda, apalagi ketika keputusan pendanaan ini dihubungkan dengan siklus hidup perusahaan (*business life cycle*), akan nampak pola bervariasi antar perusahaan (Winton & Yerramilli, 2008). Bagi UKM yang masih berada pada fase *start-up*, kebanyakan akan memanfaatkan sumber modal berupa tabungan pribadi dari pemilik, modal dari anggota keluarga bahkan teman dekat (Ullah & Taylor, 2007). Xiao (2011) yang meneliti UKM di China menemukan bahwa bagi UKM *high-tech* yang masuk fase pertumbuhan dan ingin mencapai keunggulan teknologi dapat menggunakan sumber modal jangka menengah dan panjang baik yang berasal dari pasar modal. Temuan tersebut menyuratkan bahwa tidak ada satu strategi pendanaan yang sama dan diterapkan pada semua perusahaan sesuai siklus hidupnya.

Variasi pola pendanaan tersebut sebenarnya dapat dilihat per siklus usahanya maupun dalam satu siklus usaha yang sama. Artinya, variasi pola pendanaan tersebut dapat dilihat secara *cross section* maupun *time series*. Sejauh pengetahuan peneliti, perspektif ini masih jarang dibahas dalam riset-riset pendanaan UMKM secara khususnya, sehingga melandasi dilakukannya riset ini. Penelitian ini berkontribusi untuk menambah wawasan dan perspektif yang baru di bidang Manajemen Keuangan untuk usaha kecil atau yang lebih dikenal dengan istilah *entrepreneurial finance*, terkhusus pada keputusan pendanaan. Kajian di bidang ini masih jarang diteliti (di samping kajian di bidang *corporate finance*, *behavioral finance*, dan *personal finance*), sehingga masih menyisakan banyak ruang untuk diisi oleh peneliti lainnya.

TELAAH TEORITIS

Pembahasan mengenai pendanaan/pembiayaan usaha dapat dijelaskan menggunakan teori struktur modal dalam *corporate finance*. Meski terdapat perbedaan karakteristik mendasar antara perusahaan besar dengan UMKM, namun keduanya memiliki permasalahan sama dalam keuangan. Keduanya juga dihadapkan pada masalah *asymmetry information* dan *agency problem*, namun UMKM memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan perusahaan skala besar (Gompers & Sahlman, 2002). Persamaan berikutnya antar keduanya dilihat dari jenis kebijakan keuangan yang diputuskan, namun meski demikian teori-teori yang digunakan pada level korporat sebaiknya disesuaikan dengan skopa usaha kecil agar mampu menjelaskan aspek keperilakuannya (Coleman, 2004).

Teori MM. Proposisi MM menyimpulkan bahwa keputusan pendanaan apapun (baik berhutang maupun tidak berhutang) tidak berdampak pada kemakmuran pemilik, dengan asumsi pasar modal sempurna, tidak ada pajak (Modigliani & Miller, 1958). Namun pada 1963, Modigliani dan Miller mengoreksi pernyataannya, dan menyimpulkan bahwa keberadaan pajak justru meningkatkan nilai perusahaan yang berhutang dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan hutang sebagai modal usaha. Berkurangnya beban pajak akibat berhutang menyebabkan pendapatan bersih, menjadi lebih besar (Modigliani & Miller, 1963).

Trade-off theory. Kraus and Litzenberger (1973) muncul dengan pernyataan mengenai keseimbangan antara manfaat penghematan pajak dengan biaya kebangkrutan ketika perusahaan meningkatkan hutangnya. Berada pada aliran yang sama yakni Miller (1977), terdapat titik optimal dari penggunaan hutang, namun ketika hutang terus naik justru menurunkan nilai perusahaan (*trade-off theory*). Hal ini memuat konsekuensi negatif berupa risiko kebangkrutan, dan memperbesar biaya keagenan (Jensen & Meckling, 1976).

Pecking Order Theory. Teori ini memuat preferensi perusahaan terkait alternatif sumber pendanaan usaha, dengan mempertimbangkan biaya modal yang timbul dari jenis-jenis pendanaan. Urutan pendanaan yang menjadi pilihan bagi perusahaan adalah menggunakan laba ditahan dulu, jika masih kurang akan mengambil hutang, dan alternative terakhir berupa penerbitan saham baru (Myers, 1984). Pemilihan sumber pendanaan ini tidak terlepas dari situasi ketidakseimbangan informasi yang dimiliki orang dalam perusahaan dengan pihak eksternal. Barnea, Haugen, and Senbet (1980) menyatakan bahwa UMKM cenderung menanggung biaya informasi asimetris lebih besar dibandingkan perusahaan yang telah *go public*. Tidak adanya sumber informasi bagi pihak eksternal seperti laporan keuangan yang telah diaudit (bahkan jika adapun, kualitas informasinya belum terjamin keabsahannya), akan memperbesar situasi ketidakseimbangan informasi.

Financial Life Cycle Theory. Fluck (2000), mengkaji secara khusus dinamika struktur pendanaan pada perusahaan besar dan kecil, mengapa perusahaan tersebut memilih struktur modal yang berbeda pada setiap siklus hidupnya. Umumnya, struktur modal dari usaha kecil biasanya sangat berbeda dari perusahaan besar, maupun yang sudah berjalan lama. Diamond (1991) menunjukkan pola di mana perusahaan mengakses sumber pembiayaan yang berbeda saat mereka berkembang dan sedang membangun reputasinya. Perusahaan tersebut akan memilih bank dalam pendanaan pada tahap awal siklus hidupnya. Ketika perusahaan tersebut mampu mengembangkan reputasi dengan baik, maka akan beralih ke jenis pembiayaan yang lebih murah seperti hutang publik.

Frielinghaus, Moster, and Firer (2005) menemukan adanya hubungan antara siklus hidup usaha dengan struktur modalnya, di mana hutang lebih banyak digunakan pada tahap awal (*early stage*) dan akhir (*late stage*) dibandingkan ketika perusahaan berada pada masa prima. Adizes (1996) mengartikan masa prima sebagai siklus hidup yang optimal, di mana perusahaan beroperasi dengan kapasitas efisien. Studi Hovakimian, Opler, and Titman (2001) menyatakan bahwa perusahaan harus menggunakan lebih banyak hutang untuk membiayai aset dan membiayai peluang pertumbuhan. Kondisi ini cocok diterapkan untuk UMKM yang berada pada tahap pertumbuhan (*growth*), di mana kebutuhan dana sangat besar untuk mengembangkan sayap usahanya.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan berupa data primer, meliputi status siklus usaha UKM batik dan sumber pendanaan yang digunakan dalam usahanya. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terpilih. Data sekunder berupa jumlah UMKM yang berada di lokasi penelitian diperoleh dari dinas terkait.

Populasinya adalah UMKM batik yang terletak di Kabupaten Rembang sebanyak 120 (Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Rembang, 2017), sementara sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria UMKM tersebut yang mengakses sumber dana eksternal berupa hutang maupun modal ventura sebagai salah satu sumber modal usaha ketika riset ini dilakukan. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 40 UMKM yang memenuhi syarat, dan semuanya berlokasi di Desa Lasem yang merupakan salah satu daerah penghasil batik terbesar di kabupaten tersebut.

Data yang telah diperoleh tersebut akan diolah, disajikan sehingga dapat menggambarkan potret pendanaan UMKM batik berdasarkan siklus usaha yang dialami. Adapun kategori siklus usaha dalam riset ini memodifikasi *five stage model* dari Donald, John, and Shawn (2003), yang meliputi: *existence* (baru mulai merintis usaha; identifikasi pasar potensial bagi produknya; keputusan usaha sepenuhnya berada di tangan pemilik), *survival* (berupaya meningkatkan pendapatan dan profit untuk mengembangkan usahanya), *success* (pemilik lebih mengutamakan pada perencanaan dan hal-hal yang bersifat strategis dalam usahanya; kegiatan operasional sehari-hari dialihkan ke pegawai atau orang yang dipercaya), *renewal* (adanya kerjasama dalam organisasi untuk lebih berinovasi dan kreatif; lebih mengutamakan kebutuhan konsumen) dan *decline* (pemilik lebih mengutamakan tujuan pribadi dibanding tujuan untuk memajukan usahanya; profit dan penjualan turun). Berdasarkan kategori siklus usaha tersebut, maka akan dipetakan pola pendanaan UMKM batik tersebut, apakah menggunakan sumber modal internal, eksternal maupun kombinasinya. Hasilnya akan diperoleh komparasi pola pendanaan antar UMKM maupun antar siklus usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden dan Profil Usaha

Berikut ini adalah profil pengusaha UMKM batik yang menjadi responden dalam riset ini:

Tabel 1. Profil Responden

Item	Keterangan
Jenis Kelamin	Laki-Laki: 14 (35%) Perempuan: 26 (65%)
Umur	Min: 22 tahun Max: 60 tahun Rata-Rata: 42 tahun
Tingkat Pendidikan	SD: 8 orang (20%) SMP: 10 orang (25%) SMA: 15 orang (37,5%) D3/S1: 7 orang (17,5%)
Pengalaman Usaha	Min: 5 tahun Max: 42 tahun Rata-Rata: 11 tahun

Sumber: Data Primer, diolah (2018)

Pada Tabel 1 terlihat bahwa mayoritas responden adalah perempuan, sementara usia responden dimulai dari 22 hingga 60 tahun, dengan rerata 42 tahun. Sebanyak 25% responden menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP dan 37,5% menyelesaikan jenjang SMA. Ditilik dari lamanya pengalaman usaha di bidang batik, ada yang baru berjalan 5 tahun hingga paling lama yakni 42 tahun, dengan rerata 11 tahun.

Untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai UMKM batik di daerah Lasem-Rembang, maka berikut ini juga akan ditampilkan profil pendanaan beserta tahapan siklus usahanya.

Tabel 2. Profil Pendanaan dan Tahapan Siklus Usaha

Pendanaan Usaha	Keterangan
Hutang	Min: Rp. 0 Max: Rp. 100.000.000 Rata-Rata: Rp. 22.810.256
Modal Ventura	Min: Rp. 0 Max: Rp. 100.000.000 Rata-Rata: Rp. 10.416.667
Setoran Modal Pemilik	Min: Rp. 5.000.000 Max: Rp. 2.000.000.000 Rata-Rata: Rp. 176.666.667
Tahapan Siklus Usaha	<i>Existence</i> : 8 (20%) <i>Survival</i> : 12 (30%) <i>Success</i> : 9 (22,5%) <i>Renewal</i> : 6 (15%) <i>Decline</i> : 5 (12,5%)

Sumber: Data Primer, diolah (2018)

Tabel 2. menggambarkan profil pendanaan yang digunakan oleh UMKM batik tersebut, baik yang berasal dari modal internal berupa setoran modal pemilik maupun modal eksternal yang berupa modal ventura dan hutang. Ada beberapa UMKM yang tidak pernah menggunakan hutang ataupun modal ventura untuk mendanai usahanya, sementara seluruh responden menyatakan menggunakan modal pribadi dari pemilik untuk mencukupi kebutuhan usaha.

Berdasarkan siklus hidup usaha masing-masing UMKM, ternyata berada pada fase yang beragam mulai dari *existence* hingga *decline*. Porsi terbesar berada pada fase *survival* (30%) disusul fase *success* dan *existence* masing-masing 22,5% dan 20%. UMKM yang masuk kategori *renewal* dan *decline* hanya sebanyak 15% dan 12,5%. Kondisi lapangan tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas UMKM batik di Lasem-Rembang sedang berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan profitnya agar dapat lebih mengembangkan usahanya.

Pola Pendanaan berdasarkan Siklus Hidup Usaha

Merujuk kembali pada tujuan riset ini yang ingin menggambarkan pola pendanaan UMKM batik berdasarkan siklus hidup usahanya, demikian temuan yang dapat dilaporkan:

Tabel 3. Pola Pendanaan Berdasarkan Siklus Hidup Usaha

Pola Pendanaan	Existence	Survival	Success	Renewal	Decline
H,P	87,5%	66%	67%	83%	100%
P	12,5%	-	-	17%	-
H,M	-	17%	-	-	-
H,P,M	-	17%	22%	-	-
M,P	-	-	11%	-	-

Sumber: Data Primer, diolah (2018)

Keterangan:

H : Hutang,

P : Setoran Modal Pemilik

M : Modal Ventura

Berdasarkan Tabel 3 nampak pola pendanaan yang bervariasi antar UMKM baik per fase/siklus hidup usaha maupun ketika dikomparasikan sepanjang siklus hidup usaha mulai dari *existence* hingga *decline*. Komparasi secara *cross section* menunjukkan bahwa pada fase *existence* sebanyak 87,5% responden menggunakan kombinasi sumber dana dari hutang dan setoran modal pemilik, sisanya hanya mengandalkan setoran pribadi saja (12,5%). Pada fase *existence* memang pengusaha baru mulai membangun usahanya sambil mencari ceruk pasar yang bisa dilayani. Kondisi usaha yang masih sangat prematur ini membuat segala keputusan bisnis berada di tangan pemilik (*owner*). Bahkan dalam urusan permodalan, setoran pemilik yang berasal dari tabungan pribadi, penjualan aset pribadi dan lain-lain cukup mendominasi struktur keuangannya. Hutang bisa saja menjadi salah satu sumber modal, terutama yang berasal dari pinjaman anggota keluarga dan teman dekat, dengan atau tanpa biaya modal sama sekali. Hutang dari lembaga keuangan formal belum banyak diambil karena adanya kendala informasi asimetri dari UMKM ini yang menyulitkannya mengakses modal eksternal (Denis, 2004), terutama pada fase *existence*.

Fase *survival*, modal hutang dan setoran modal pemilik masih mendominasi (66%) di samping kombinasi hutang-modal ventura dan hutang-setoran modal pemilik-modal ventura. Pada fase ini mulai muncul sumber dana baru berupa modal ventura yang dapat dimanfaatkan bersama dengan sumber dana lainnya untuk tumbuh dan berkembangnya usaha.

Fase *success*, memiliki keberagaman kombinasi pola pendanaan. Jika dicermati, modal ventura digunakan bersamaan dengan hutang jangka pendek (jatuh tempo di bawah 1 tahun) maupun jangka panjang (jatuh tempo di atas 1 tahun) dan setoran modal pemilik. Meski demikian, porsi hutang-setoran modal pemilik masih mendominasi pada tahapan ini (67%).

Fase *renewal* memiliki pola pendanaan yang lebih sederhana dibandingkan fase sebelumnya yakni hanya bersumber dari kombinasi hutang-setoran modal pemilik (83%) dan murni dari pemilik saja (17%). Pada fase ini, UMKM memfokuskan diri pada aktivitas inovasi dan kreatifitas agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Perlu adanya sesuatu yang baru yang ditawarkan ke pasar agar bisnis yang dijalankan selama ini dapat terus berkelanjutan. Untuk keperluan itu, dibutuhkan modal yang berasal dari setoran pemilik dan hutang saja. Pemilik usaha merasa tidak perlu adanya intervensi dari pihak investor terhadap laju usahanya, sehingga modal ventura tidak terlalu diminati pada tahapan ini.

Fase *decline* yang merupakan fase krusial dan perlu mendapat perhatian lebih serius, menunjukkan pola pendanaan yang berbeda signifikan dengan fase-fase sebelumnya. Terlihat bahwa 100% sumber dana berasal dari kombinasi hutang-setoran modal pemilik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, ketika suatu usaha berada pada tahapan kritis dan butuh dipertahankan maka akan memerlukan sumberdaya yang memadai. Salah satunya berupa kecukuoan modal untuk kelangsungan usaha tersebut. Ketika modal pribadi tidak lagi mencukupi kebutuhan, maka alternative hutang dapat diambil untuk menyelamatkan usaha tersebut. Bahkan tidak jarang, hutang dari saudara atau kerabat dekat menjadi pilihan di samping hutang dari lembaga keuangan formal. Adomdza, Åstebro, and Yong (2016) menyatakan bahwa jenis investor *strong-tie* dapat lebih mudah memberikan dana dibanding investor tipe *weak-tie* karena adanya beban sosial ketika tidak bisa membantu seseorang yang memiliki hubungan baik dengannya.

Komparasi pola pendanaan juga dapat dilakukan secara *time series*, dengan cara melihat pola di setiap siklus hidup usaha. Merujuk pada Tabel 3, pola pendanaan hutang-setoran modal pemilik muncul di semua tahapan siklus usaha, dan porsi terbesar berada pada tahapan *decline* (100%). Modal ventura jarang digunakan oleh UMKM, sebab hanya muncul pada fase *survival* dan *success*. Sementara 100% setoran modal pemilik terlihat pada fase *renewal* dan *existence*. Hasil riset ini sejalan dengan Berger and Udell (1998) dan Frielinghaus et al. (2005) yang menyatakan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan tipe pendanaannya setiap waktu seiring perubahan siklus usaha.

PENUTUP

Pada sesi ini akan dipaparkan kesimpulan dan keterbatasan yang dapat menjadi agenda riset mendatang pada topik yang serupa.

Simpulan.

Terdapat dua hal yang bisa disimpulkan dalam riset ini, yaitu:

- 1) Tidak ada pola pendanaan seragam yang diterapkan oleh masing-masing UMKM meski berada dalam industri dan siklus usaha yang sama. Kebutuhan modal disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan situasi kewirausahaan yang dihadapi setiap UMKM.
- 2) Pola pendanaan setiap UMKM juga mengalami perubahan di sepanjang siklus hidupnya. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM perlu melakukan penyesuaian/adaptasi keputusan pendanaannya seiring perubahan siklus bisnisnya agar dapat tetap bertahan.

Saran.

Riset ini memiliki ruang lingkup keputusan keuangan sebatas pola pendanaan saja, belum mencakup aspek keputusan investasi yang dilakukan UMKM di sepanjang siklus hidup usahanya. Usulan ini dapat menjadi agenda riset mendatang mengingat keputusan pendanaan erat kaitannya dengan keputusan investasi. Selain itu, obyek penelitian dalam studi ini adalah UMKM yang masuk kategori industri kreatif. Dimungkinkan ditemui pola pendanaan sama atau berbeda dengan temuan ini ketika mengkaji obyek penelitian UMKM di sektor lain. Metode yang digunakan dalam riset ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga memungkinkan dilakukan pengujian secara empirik mengenai pengaruh siklus hidup usaha terhadap keputusan pendanaan maupun investasi pada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adizes, I. (1996). The 10 stages of corporate life cycles. *Inc.*, 18(14), 95-97.
- Adomdza, G. K., Åstebro, T., & Yong, K. (2016). Decision Biases and Entrepreneurial Finance. *Small Business Economics*, 47(4), 819–834. doi:10.1007/s11187-016-9739-4
- Barnea, A., Haugen, R. A., & Senbet, L. W. (1980). A rationale for debt maturity structure and call provisions in the agency theoretic framework. *The Journal Of Finance*, 35(5), 1223-1234.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle. *Journal of Banking and Finance*, 22(6), 613-673.
- Coleman, S. (2004). Variations on A Theme: Teaching Entrepreneurial finance. *Journal of Entrepreneurship Education*, 7, 73-81.
- Denis, D. J. (2004). Entrepreneurial Finance: An Overview of the Issues and Evidence. *Journal of Corporate Finance*, 10, 301-326.
- Diamond, D. W. (1991). Debt maturity structure and liquidity risk. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(3), 709-737.
- Donald, L. L., John, A. P., & Shawn, C. (2003). Organizational Life Cycle: A Five-Stage Empirical Scale. *The International Journal of Organizational Analysis*, 11(4), 339-354. doi:10.1108/eb028979
- Edewor, P. A., Imhonopi, D., & Amusan, T. (2014). Socio-Cultural and Demographic Dynamics in Sustainable Entrepreneurial Development in Nigeria *Developing Country Studies*, 4(4), 58-64.

- Farkas, G. (2016). The effects of strategic orientations and perceived environment on firm performance. *Journal of Competitiveness*, 8(1).
- Fluck, Z. (2000). Capital Structure Decisions in Small and Large Firms: A Life-Cycle Theory of Financing.
- Frielinghaus, A., Moster, B., & Firer, C. (2005). Capital Structure and Firm's Life Stage. *South African Journal of Business Management*, 36(4).
- Gompers, P. A., & Sahlman, W. A. (2002). *Entrepreneurial finance: a case book*: John Wiley & Sons.
- Hovakimian, A., Opler, T., & Titman, S. (2001). The debt-equity choice. *Journal Of Financial And Quantitative Analysis*, 36(1), 1-24.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. *Journal Of Finance*, September, 911-922.
- Miller, M. H. (1977). Debt and Taxes. *The Journal of Finance*, 32(2), 261-275.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261-297.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433-443.
- Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. *Journal Of Finance*, 57(3), 575-592.
- Rita, M. R., Wahyudi, S., & Muharam, H. (2017). *The Power of Finance: The Dynamics of Female Entrepreneurs in Fulfilling Their Financial Needs*. Paper presented at the Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship, Surabaya.
- Shinozaki, S. (2014). A New Regime of Sme Finance in Emerging Asia: Enhancing Access To Growth Capital and Policy Implications. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 5(3), 1-27. doi:10.1142/S1793993314400109
- Ullah, F., & Taylor, P. (2007). Are UK technology-based small firms still finance constrained? *International Entrepreneurship and Management Journal*, 3(2), 189-203.
- Winton, A., & Yerramilli, V. (2008). Entrepreneurial Finance: Banks versus Venture capital. *Journal of Financial Economics*, 88(1), 51-79. doi:10.1016/j.jfineco.2007.05.004
- Xiao, L. (2011). Financing High-Tech Smes in China: A Three-Stage Model of Business Development. *Entrepreneurship and Regional Development*, 23(3-4), 217-234. doi:10.1080/08985620903233937

**Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan
untuk Lembaga Pendidikan
Studi pada LPIT Al-Furqan Yogyakarta**

*Development of Sales Accounting Information System
for Educational Institutions
Study in LPIT Al-Furqan Yogyakarta*

Edy Anan

Program Studi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

M Sofyan Indrajaya

Mahasiswa S2 Program Magister Akuntansi, Universitas Gajah Mada

**ARTICLES
INFORMATION**

E B B A N K

Vol. 9, No. 2, Desember 2018

Halaman : 35 - 50

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

*Pengembangan, sistem informasi
akuntansi penjualan, lembaga
pendidikan.*

JEL classifications :

Contact Author :

^a edyanan@amikom.ac.id,

^b sofyanindra@gmail.com,

ABSTRACT

This study aims to develop a sales accounting information system for educational institutions. Development efforts with case studies at Al-Furqan LPIT Yogyakarta. In contrast to some previous studies that use the subject of a trading company organization, this study uses the organization of educational institutions. Data collection techniques are carried out with methods of observation, interviews and documentation. System development is done by designing and using the SDLC method (System Development Life Cycle). Analysis of sales transactions using PIECES analysis.

The results of research on LPIT Al-Furqan show that in addition to the development of sales accounting information systems, it is also necessary to develop Point of Sale (POS) and Payroll purchasing systems. This is intended to make the system more integrated. To overcome the lack of accounting softness for educational institutions, it is generally necessary to develop open source software on the market, so that it can be used by a wider organization of educational institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan dalam struktur industri dan praktik pengelolaan organisasi bisnis (Taufiq, 2008). Bisnis menjadi lebih kompetitif dalam melaksanakan kegiatan melayani pelanggan. Kebutuhan sistem informasi dalam pengambilan keputusan manajemen menjadi bagian yang terpenting. Untuk membantu manajemen mengambil keputusan maka diperlukan kualitas informasi yang baik yaitu yang dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya dan tepat waktu.

Adanya sistem informasi maka proses penyediaan informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Biaya organisasi menjadi lebih ekonomis. Pertumbuhan organisasi menjadi lebih cepat dan siap menghadapi persaingan. Persaingan organisasi tidak hanya pada organisasi bisnis yang berorientasi laba, namun juga pada organisasi nirlaba seperti rumah sakit dan sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014) menjelaskan bahwa jumlah lembaga pendidikan sekolah dasar di DI Yogyakarta sebanyak 1.843 sekolah dasar dan 168 madrasah ibtidaiyah. Sedangkan jumlah murid sejumlah 292.164 siswa sekolah dasar dan 15.410 siswa ibtidaiyah. Data ini belum termasuk sekolah dasar swasta yang terdapat di DI Yogyakarta.

Data BPS tersebut menunjukkan bahwa persaingan pada lembaga pendidikan sangatlah ketat. Sekolah dituntut meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikannya. Pelayanan pendidikan seperti sistem informasi sekolah yang transparan, komunikasi guru, murid dan wali murid yang baik. Sedangkan mutu pendidikan seperti kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adanya pelayanan dan mutu pendidikan mutlak memerlukan adanya sistem informasi relevan dan realible

Salah satu sistem informasi yang penting bagi organisasi adalah sistem informasi penjualan. Romney dan Steinbart (2011) menjelaskan jika organisasi tidak menerapkan sistem informasi penjualan maka beresiko terjadinya kehilangan data penjualan, piutang yang tidak tertagih, kesalahan dalam pencatatan piutang, terjadinya pencurian kas, dan data penjualan yang kurang akurat dan kurang valid. Selain itu dengan tidak adanya sistem informasi penjualan maka sangat sulit bagi organisasi untuk mendapatkan informasi penjualan yang akurat dalam waktu yang singkat.

LPIT Al-Furqan Yogyakarta merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. Aktivitas utamanya adalah menyediakan fasilitas pendidikan dari jenjang *baby class* sampai dengan sekolah dasar. Berdasarkan wawancara pada bagian keuangan, pencatatan transaksi telah menggunakan *Microsoft Excel* namun pada proses penghitungan dan penyajian laporannya masih dilakukan secara manual. Diperlukan waktu 1 hari kerja untuk membuat laporan penerimaan kas, piutang dan pembayaran. Bagian keuangan perlu mengelompokkan data berdasarkan siswa satu per satu. Kemudian menghitung tagihan, pembayaran dan piutangnya. Untuk itu diperlukan rancang bangun sistem informasi akuntansi penjualan pada LPIT Al-Furqan Yogyakarta.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Moscovice dan Simkin dalam Jogiyanto (2005) sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam perusahaan (secara prinsip adalah manajemen).

Berikut adalah lima komponen Sistem Informasi Akuntansi:

- 1) Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
- 2) Prosedur-prosedur, baik yang manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
- 3) Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
- 4) *Software* yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- 5) Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Penjualan adalah kegiatan penyerahan barang atau jasa kepada pembeli atau pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Mulyadi (2016) menjelaskan dua jenis penjualan yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Pada transaksi penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. Sedangkan pada transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya.

Krismiaji (2005) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi penjualan guna menghasilkan informasi yang bermanfaat merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis, selain itu sebuah sistem informasi akuntansi penjualan bisa dikatakan berjalan secara optimal jika sistem tersebut bisa meningkatkan nilai bisnis suatu organisasi peningkatan nilai bisnis tersebut maksudnya ialah sistem dapat mengurangi biaya, peningkatan efisiensi, dapat memberikan informasi tepat waktu untuk memperbaiki pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan merupakan rangkaian subsistem yang memiliki tujuan untuk mengolah data dari transaksi penjualan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan oleh penggunanya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Pengembangan Sistem

Proses pengembangan sistem informasi diawali dari konsep yang kemudian diwujudkan dalam proses pengembangan. Setelah proses pengembangan, sistem informasi kemudian diimplementasikan dan dioperasikan. Menurut Jogiyanto (2005) pengembangan sistem adalah proses penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.

Adapun tahapan-tahapan siklus pengembangan sistem (*System Development Life Cycle*) menurut Mulyadi (2016) yaitu :

- a. Analisis sistem (*system analysis*)
- b. Desain sistem (*system design*)
- c. Implementasi sistem (*system implementation*)

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menggunakan subjek perusahaan dagang seperti Septiadi (2010), Sirait, Sutarmanto, dan Rahim (2015), Anderson dan Lulu (2015), Riskiwati (2016), dan Santoso & Wiradinata (2016). Pada penelitian menggunakan subjek lembaga pendidikan. Berikut penelitian terdahulu :

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Septiadi	Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan (Studi Kasus : Kita Market Tegal)	Perancangan : SDLC Analisis : PIECES	Sistem informasi penjualan yang dirancang dapat membantu merekap penjualan pada Kita Market Tegal. Dengan sistem baru Market Tegal juga dapat melakukan <i>stock opname</i> dengan mudah. Resiko barang yang hilang lebih kecil dibandingkan ketika menggunakan pencatatan manual.
2	Santoso & Wiradinata	Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi pada UD. Sejahtera	Perancangan : SDLC	Sistem informasi akuntansi pembelian dan hutang berbasis <i>web</i> . Dengan adanya sistem baru, catatan penjualan telah tersusun secara sistematis. Pembuatan laporan pembelian dan rekap hutang usaha menjadi lebih mudah.
3	Sirait, Sutarmanto, dan Rahim	Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Aktiva Tetap Studi Kasus PT Sumber Indah Lestari	Perancangan : SDLC	Sistem informasi akuntansi aktiva tetap memudahkan staff akunting dalam pencatatan penambahan aktiva tetap, mutasi aktiva tetap, perbaikan aktiva tetap, serta penghapusan aktiva tetap. Selain itu, dapat mempercepat pembuatan laporan aktiva tetap, yang dapat diakses dimana dan kapan saja oleh koordinator dan manager akunting.
4	Anderson dan Lulu	Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi pada CV. Riau Jaya	Perancangan : SDLC Pengujian : UAT	Sistem informasi akuntansi yang dirancang mempermudah dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.
5	Riskiwati	Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-obatan Terkomputerisasi yang Efisien dan Efektif pada Perusahaan	Perancangan : SDLC	Sistem yang dirancang mempermudah perusahaan dalam mengendalikan persediaan obat. Penyusunan laporan stok <i>opname</i> dan penjualan lebih cepat dan lebih mudah disusun.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *research and development* atau penelitian pengembangan. Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan menggunakan model SDLC (*System Development Life Cycle*). Menurut Widjayanto (2001) SDLC adalah daur dari suatu perkembangan sistem informasi mulai dari konsepsi yang berwujud gagasan, proses pengembangan, hingga implementasi dan pengoperasiannya.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah LPIT Al-Furqan, Dusun Penen, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penjualan pada LPIT Al-Furqan yang meliputi seluruh komponen yang membentuk sistem informasi akuntansi penjualan serta bagaimana data diproses sampai menghasilkan *output* berupa laporan penjualan.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Metode Observasi (*Observation Method*)

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Observasi digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada objek penelitian. Penulis melakukan observasi secara langsung di LPIT Al-Furqan di Dusun Penen, Ngaglik, Sleman.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan manajemen untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai seluruh proses transaksi yang terjadi di LPIT Al-Furqan.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder dari LPIT Al-Furqan. Dokumen yang dikumpulkan antara lain adalah catatan-catatan akuntansi seperti kuitansi penjualan serta dokumen-dokumen yang digunakan LPIT Al-Furqan dalam melakukan penjualan. Metode dokumentasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi dokumen yang digunakan serta mengetahui bagaimana alur atau prosedurnya.

Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan dalam melakukan analisis data adalah SDLC (*System Development Life Cycle*). Menurut Jogiyanto (2013), SDLC memiliki beberapa tahapan-tahapan, yaitu analisis sistem (studi pendahuluan dan studi kelayakan), perancangan sistem, implementasi sistem, operasi dan perawatan sistem.

1. Tahap Analisis Sistem

Pada proses analisis ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menganalisis sistem yang telah berjalan dan merancang kebutuhan sistem baru. Tahapan tersebut antara lain adalah

a. Analisis PIECES

Al Fattah (2007) menjelaskan analisis sistem menggunakan metode PIECES (*Performance, Information, Economy, Control, Eficiency and Services*). Analisis ini terdiri dari :

- 1) *Performance*, analisis *performance* ini berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi kinerja sistem yang akan dirancang.
- 2) *Information*, analisis *information* berkaitan dengan keakuratan dan ketepatan informasi yang disediakan sistem.
- 3) *Economy*, analisis *economy* berkaitan dengan perhitungan *cost and benefit* untuk menilai layak atau tidaknya perancangan sistem yang akan dilakukan dari segi ekonomi.

- 4) *Control*, analisis *control* berkaitan dengan pengendalian yang ada untuk mengurangi kesalahan yang terjadi
- 5) *Efficiency*, analisis *efficiency* berkaitan dengan peningkatan efisiensi operasional perusahaan dengan cara membandingkan input dan output.
- 6) *Services*, analisis *services* berkaitan terhadap peningkatan pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh sistem.

b. Analisis Kebutuhan Sistem

Setelah mengetahui kelemahan sistem lama, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis kebutuhan sistem yang akan dirancang. Analisis kebutuhan sistem dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional.

Analisis Kelayakan Sistem

Selain kebutuhan sistem, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kelayakan sistem yang akan dirancang. Untuk mengetahui suatu sistem layak diterapkan, maka ada beberapa aspek yang perlu dianalisis. Aspek-aspek yang perlu dianalisis adalah aspek teknis, operasional, ekonomi dan hukum. Pada aspek ekonomi, ada tiga metode kuantitas yang akan digunakan untuk menilai kelayakan.

Antara lain metode PP (*Payback Period*), NPV (*Net Present Value*) dan ROI (*Return On Investment*). Ketiga metode tersebut digunakan untuk mengetahui apakah dana yang dikeluarkan untuk merancang sistem baru layak atau tidak.

2. Tahap Perancangan Sistem

Tahap yang dilakukan dalam perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas antara lain adalah :

a. Pemodelan *Database*

Pemodelan *database* yang digunakan adalah *Entity Relationship Diagram* (ERD). ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Tabel-tabel yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada LPIT Al-Furqan adalah sebagai berikut :

- 1) Tabel Siswa
- 2) Tabel Tagihan
- 3) Tabel Detail Tagihan
- 4) Tabel Jasa
- 5) Tabel Penerimaan
- 6) Tabel Detail Penerimaan

b. Pemodelan Proses

Pemodelan proses diperlukan untuk menggambarkan jalannya sistem. Dengan adanya pemodelan proses diharapkan dapat mempermudah gambaran dan pemahaman terhadap proses yang dilakukan.

c. Desain *Interface*

Pemodelan antar muka atau *interface* dilakukan untuk merancang tampilan dari sistem. Pemodelan *interface* terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah pemodelan desain *input*. Pemodelan desain *input* akan menghasilkan *form* yang berbeda-beda, tergantung dengan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah pemodelan desain *output*. Pemodelan desain *output* akan menghasilkan berapa laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan dihasilkan.

Form yang akan dihasilkan dari desain *input* antara lain adalah :

- 1) *Form* Login
- 2) *Form* Siswa
- 3) *Subform* Detail Siswa
- 4) *Subform Preview* Siswa
- 5) *Form* Jasa
- 6) *Subform* Detail Jasa
- 7) *Form* Tagihan
- 8) *Subform* Detail Tagihan
- 9) *Subform Preview* Tagihan
- 10) *Form* Penerimaan
- 11) *Subform* Detail Penerimaan
- 12) *Subform Preview* Penerimaan
- 13) *Form* Piutang
- 14) *Form Preview* Piutang

Laporan yang akan dihasilkan dari desain *output* diantaranya adalah:

- 1) Laporan Penjualan
- 2) Laporan Piutang
- 3) Laporan Penerimaan Kas
- 4) Laporan Data Siswa

3. Tahap Implementasi

Ada dua tahap dalam melakukan implementasi sistem baru yaitu:

a. Perencanaan Implementasi

Pada tahap perencanaan yang dilakukan adalah melakukan persiapan *software*, *hardware* dan data yang akan dimasukkan.

b. Implementasi Sistem

Pada proses awal implementasi sistem pengguna diperkenalkan terlebih dahulu tentang sistem yang nantinya akan dijalankan. Yang perlu dikenalkan kepada pengguna antara lain adalah cara pengoperasian, fitur-fitur dan langkah-langkah yang perlu dilakukan saat terjadi *error* dalam sistem.

Setelah dilakukan pengenalan sistem baru, langkah selanjutnya adalah melakukan konversi panel. Yaitu dengan cara menerapkan dan mengoperasikan sistem baru bersamaan dengan sistem lama. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap sistem baru. Selain itu langkah konversi panel juga digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan pada sistem yang baru.

Apabila dari implementasi yang dilakukan terdapat proses yang tidak sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem baru. Jika sistem baru sudah dapat berjalan dengan baik maka langkah selanjutnya adalah melakukan konversi sistem. Pada penelitian ini konversi yang digunakan adalah konversi modular. Konversi modular adalah implementasi sistem dengan cara bertahap atau sebagian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Organisasi

LPIT Al-Furqan berdiri pada tanggal 26 Juni 2011 di Dusun Penen, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. LPIT Al-Furqan didirikan oleh Hj. Wenny Martini dan Ibu Dwi Ningsih sebagai Lembaga Pendidikan Islam Terpadu. Pendirian LPIT Al-Furqan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan ketersediaan jenjang pendidikan dasar Islam yang terjangkau.

LPIT Al-Furqan menerapkan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diintegrasikan dengan kurikulum lembaga. Guna menghasilkan siswa-siswi yang cerdas, sehat, dan berakhlak karimah, LPIT Al-Furqan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam kesehariannya. LPIT Al-Furqan didukung oleh tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten baik dari sisi akademik maupun *dinniyah* (keagamaan).

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Sistem informasi akuntansi penjualan pada LPIT Al-Furqan berhubungan dengan sistem penerimaan kas dan sistem penjualan kredit. Ketika terjadi aktivitas penjualan secara kredit maka piutang akan mengalami kenaikan dari penjualan. Yang dimaksud pelanggan dalam penelitian ini adalah wali siswa, yaitu orang tua yang menyekolahkan anaknya di LPIT Al-Furqan.

a. Dokumen dan Catatan Sistem Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Dokumen dan catatan yang dibuat mulai dari aktivitas penjualan sampai dengan pelaporan antara lain adalah :

1) Surat Tagihan

Surat tagihan merupakan surat yang berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Surat tagihan akan diberikan kepada wali siswa sebagai pemberitahuan bagi wali siswa agar melakukan pembayaran.

2) Kuitansi

Kuitansi adalah bukti pembayaran atau penyerahan kas sebagai pelunasan atas pembelian. Kuitansi terdiri dari tiga rangkap, lembar pertama akan diserahkan pada wali siswa dan lembar kedua akan diberikan ke yayasan dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip.

3) Catatan Piutang

Catatan tagihan berisi tentang rincian piutang LPIT Al-Furqan kepada setiap siswanya.

4) Laporan Penjualan

Laporan penjualan disusun dengan cara melakukan rekap data penjualan. Laporan penjualan juga digunakan untuk mengetahui informasi tentang nama siswa yang sudah melakukan pembayaran dan jasa apa yang telah dibayar.

b. Prosedur Bagan Alir Sistem Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Prosedur *input* data yang dilakukan masih secara manual. Mulai dari pembuatan surat tagihan, kuitansi, catatan penjualan sampai dengan penyusunan laporan penjualan

1) Prosedur Penerimaan Kas

Bagian administrasi dan keuangan menghitung jenis jasa apa yang akan dibayar beserta dengan jumlah dan tarif jasanya. Setelah dihitung kemudian wali siswa melakukan pembayaran. Saat uang diterima, kemudian bagian administrasi dan keuangan membuat kuitansi pembayaran. Kuitansi kemudian diserahkan kepada wali siswa sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran.

2) Prosedur Pencatatan Piutang

Untuk wali siswa yang belum melakukan pembayaran pada setiap akhir bulan, maka akan direkap datanya oleh bagian administrasi dan keuangan. Kemudian dibuatkan surat tagihan.

3) Prosedur Pencatatan Penjualan

Setelah uang hasil penjualan jasa diterima kemudian bagian administrasi dan keuangan melakukan pencatatan atas penjualan yang terjadi.

c. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pada LPIT Al-Furqan belum berjalan dengan baik. Belum adanya pembagian fungsi seperti fungsi pencatatan dan fungsi penjualan. Sehingga pengendalian internal belum dapat dijalankan.

Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Pengembangan yang diusulkan menggunakan metode SDLC (*System Development Life Cycle*). Pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis sistem lama, kebutuhan sistem dan kelayakan sistem.

1. Analisis Transaksi Penjualan

Tabel 2.
Analisis PIECES

Analisis	Kelemahan Sistem Lama	Sistem yang Akan Dibuat
Kinerja (<i>Performance</i>)	Pencatatan piutang dan penyusunan laporan penjualan masih dilakukan secara manual. Proses tersebut memerlukan waktu tambahan 1 hari kerja pada akhir pekan untuk melakukan rekap dan membuat laporan piutang dan penjualan.	Pencatatan piutang dan pembuatan laporan penjualan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Sistem yang akan dibuat secara otomatis akan menghitung piutang. Sehingga laporan dapat langsung dihasilkan
Informasi (<i>Information</i>)	Masih ada kesalahan perhitungan pada proses penyusunan laporan, sehingga laporan yang dihasilkan belum bisa dikatakan akurat.	Laporan penjualan secara otomatis tersusun bersamaan dengan proses <i>input</i> yang dilakukan sehingga tidak ada kesalahan informasi dan perhitungan dalam laporan yang dihasilkan.
Ekonomi (<i>Economy</i>)	Bagian administrasi dan keuangan sering melakukan lembur kerja dalam proses penyusunan laporan penjualan dan rekap piutang. Dalam satu bulan bagian administrasi dan keuangan melakukan 4 kali lembuar di setiap akhir pekan. Hal ini menyebabkan yayasan perlu membayar upah lembur.	Dengan adanya sistem baru yang dapat melakukan penyusunan laporan secara otomatis, maka biaya yang dikeluarkan untuk membayar lembur karyawan akan lebih sedikit.
Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	Pada sistem lama, setiap ada transaksi penjualan maka bagian administrasi dan keuangan perlu menambahkan transaksi penjualan tersebut kedalam laporan penjualan dan catatan piutang apabila transaksi yang dilakukan adalah pembayaran piutang.	Pada sistem baru laporan keuangan dan catatan piutang akan tersusun secara otomatis apabila ada transaksi baru.
Keamanan (<i>Control</i>)	Proses secara manual menyebabkan adanya kesalahan dalam perhitungan.	Proses pada sistem baru dapat mengurangi kesalahan dalam proses perhitungan.
Layanan (<i>Services</i>)	Memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahui jumlah piutang wali siswa yang akan melakukan pembayaran. Karena harus mencari satu per satu catatan pembayaran yang telah dilakukan.	Proses pencarian informasi piutang dapat dilakukan dengan cepat. Karena data piutang telah tersimpan secara otomatis. Sehingga lebih cepat dalam proses pencariannya.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

a) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang mencakup proses apa saja yang akan dilakukan oleh sistem baru, informasi apa saja yang harus ada pada sistem baru. Berikut adalah kebutuhan fungsional pada sistem baru :

- (1) Sistem yang dipakai oleh pengguna
 - (a) Adanya *password* yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem
 - (b) *Password* yang digunakan dapat diubah
- (2) Sistem dapat mencatat tagihan
 - (a) Sistem dapat mencatat seluruh surat tagihan
 - (b) Sistem dapat menjumlahkan total tagihan secara otomatis
 - (c) Sistem dapat mencetak surat tagihan
- (3) Sistem dapat mencatat piutang
 - (a) Sistem dapat mencatat pembayaran piutang
 - (b) Sistem dapat menghitung total piutang siswa
 - (c) Sistem dapat menghitung pelunasan piutang
 - (d) Sistem dapat mencetak kuitansi pembayaran secara otomatis
- (4) Sistem dapat menampilkan nama siswa dan melakukan entri siswa
 - (a) Pengguna dapat mengetahui nama siswa
 - (b) Pengguna dapat melakukan entri siswa
 - (c) Pengguna dapat melakukan edit siswa
 - (d) Pengguna dapat menghapus data siswa
- (5) Sistem dapat menampilkan informasi mengenai jasa yang dijual dan melakukan entri jasa
 - (a) Pengguna dapat mengetahui jenis jasa dan harga jual jasa
 - (b) Pengguna dapat melakukan entri jasa
 - (c) Pengguna dapat melakukan edit jasa
 - (d) Pengguna dapat melakukan menghapus data jasa
- (6) Sistem dapat menampilkan laporan otomatis
 - (a) Laporan penjualan
 - (b) Laporan piutang
 - (c) Laporan penerimaan kas
 - (d) Laporan data siswa

b) Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung berdampak pada fungsi sistem informasi.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dapat mendukung berjalannya kebutuhan operasional.

(1) Operasional

Pada operasional yang diperlukan antara lain adalah :

(a) Hardware

Spesifikasi hardware yang diperlukan untuk menjalankan sistem baru antara lain adalah :

- *Processor Intel Pentium Core Duo* atau lebih tinggi
- RAM 1 GB
- *Hard Disk* 250 GB
- *Monitor, Mouse dan Keyboard*
- *Printer*

(b) Software

Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem antara lain adalah :

- Sistem operasi *Windows 7*
- *Microsoft Office 2007*

(c) Brainware

Brainware adalah personal yang menggunakan sistem. Dalam hal ini diusulkan adanya operator yang melakukan *input* data, peneditan, pemeliharaan data dan pembuatan laporan

(2) Kinerja

Sistem baru akan dapat mempercepat seluruh proses yang berkaitan dengan sistem penjualan manual.

(3) Keamanan

Akses untuk menggunakan sistem baru sudah menggunakan *password*. Sehingga yang dapat menggunakan sistem hanya bagian keuangan dan administrasi saja.

(4) Informasi

Informasi yang dihasilkan sistem informasi baru adalah informasi mengenai laporan penjualan, laporan piutang, dan laporan penerimaan kas.

3. Analisis Kelayakan Sistem

a) Kelayakan Teknis

Pada LPIT Al-Furqan sudah terdapat seperangkat komputer lengkap. CPU (*Central Processing Unit*) beserta perlengkapannya (*Mouse, Keyboard dan Monitor*) yang spesifikasinya cukup untuk menjalankan sistem informasi akuntansi penjualan yang akan dirancang.

Secara teknis karyawan bagian administrasi dan keuangan pada LPIT Al-Furqan sudah mengetahui cara pengoperasian sistem operasi pada komputer. Cukup dilakukan dilakukan pelatihan pada tahap awal dan pendampingan pada tahap selanjutnya. Karena tidak diperlukan keahlian khusus dalam pengoperasiannya.

b) Kelayakan Operasional

Sistem informasi akuntansi penjualan yang dirancang dapat lebih mengoptimalkan proses penjualan dan penyusunan laporan piutang dan laporan penjualan, sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan lebih efisien. Sistem ini juga meminimalisir kesalahan akibat terjadinya *human error*, supaya informasi-informasi yang diperlukan LPIT Al-Furqan dengan cepat dan akurat.

c) Kelayakan Ekonomis

Analisis kelayakan ekonomis bertujuan untuk mengetahui manfaat sistem informasi akuntansi penjualan dari segi ekonomi. Manfaat yang didapat harus sebanding atau lebih dari besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Analisis kelayakan ekonomi menggunakan metode *payback period* (PP), *net present value* (NPV) dan *return on investment* (ROI). *Payback period* (PP) sistem baru setelah perhitungan menunjukkan bahwa investasi dapat kembali dalam jangka waktu 1 tahun 3 hari. *Payback period* kurang dari tiga tahun sehingga investasi layak dijalankan. Hasil perhitungan NPV menunjukkan Kondisi positif yaitu sebesar Rp. 4.493.524. NPV menunjukkan lebih besar dari nol sehingga investasi layak dijalankan. Pada hasil perhitungan ROI menunjukkan pengembalian investasi sebesar 26,73% yang berarti bahwa investasi layak dijalankan.

d) Kelayakan Legal

Sistem baru yang akan diterapkan menggunakan perangkat lunak yang legal dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Sehingga sistem informasi akuntansi penjualan yang akan dirancang layak dari segi kelegalannya.

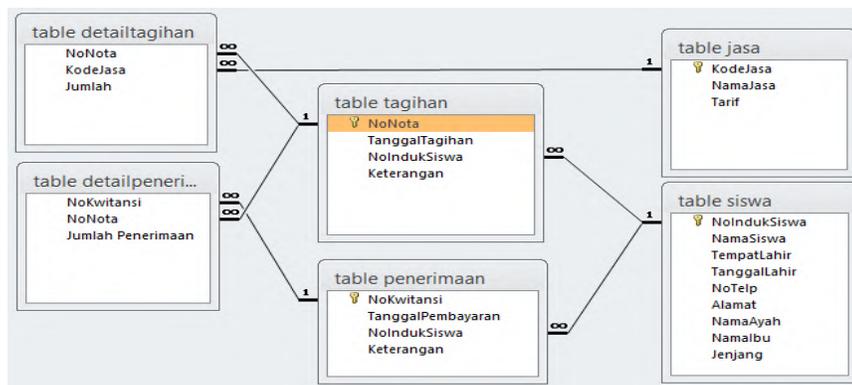
Desain Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Desain sistem yang dibuat meliputi desain *database*, desain *input* dan desain *output*. Desain *database* yang berisi beberapa tabel, yaitu tabel siswa, tabel tagihan, tabel detail tagihan, tabel jasa, tabel penerimaan tabel detail penerimaan. Pada desain *input* berisi *form* login, *form* siswa, *subform* detail siswa, *subform* preview siswa, *form* jasa, *subform* detail jasa, *form* tagihan, *subform* detail tagihan, *subform* preview tagihan, *form* penerimaan, *subform* detail penerimaan, *subform* preview penerimaan, *form* piutang, *form* preview piutang. Sedangkan pada desain *output* menghasilkan laporan penjualan laporan piutang, laporan penerimaan kas, laporan data siswa.

Relasi Antar Database

Relasi antar data database digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Relasi Antar Database



Desain Proses

Desain proses digunakan untuk mempermudah pengguna dalam memahami proses dalam sistem. Pada sistem yang dibuat, terdapat lima proses. Antara lain proses *login*, proses *input* jasa, proses *input* siswa, proses *input* tagihan, proses *input* penerimaan.

Desain Interface

Desain *interface* atau antar muka, memudahkan pengguna dalam memahami perintah, informasi dan *input* data. Desain *interface* terdiri dari desain *interface* dashboard, desain *interface* penerimaan, *interface* input penerimaan, *interface* tagihan, *interface* input tagihan, *interface* piutang, *interface* siswa, *interface* input siswa, *interface* jasa, *interface* input jasa

Gambar 2 Desain *Interface*



Impelementasi Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

1) Mempersiapkan Rencana Implementasi

Pada tahap implementasi sistem, yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung sistem. Supaya sistem dapat berjalan dengan efektif dan efisien sumber daya manusia atau pengguna juga perlu dilatih untuk menggunakan sistem.

2) Pengujian dan Implementasi Sistem

Terdapat 14 proses dalam pengujian dan implementasi sistem baru. 14 proses ini dilakukan secara bersamaan, ketika pada proses implementasi terdapat *bug* maka sistem akan langsung diperbaiki. 14 Proses tersebut meliputi *Login*, *Input* Jasa, *Ubah* Jasa, *Hapus* Jasa, *Input* Siswa, *Ubah* Siswa, *Hapus* Siswa, *Input* Tagihan, *Ubah* Tagihan, *Hapus* Tagihan, *Input* Penerimaan, *Ubah* Penerimaan, *Hapus* Penerimaan, *Cetak* Piutang.

Pembahasan

1. Fungsi yang Sistem Informasi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Fungsi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi penjualan pada LPIT Al-Furqan terdiri dari fungsi sistem penjualan kredit dan fungsi penerimaan kas. Pada fungsi kredit, bagian administrasi dan keuangan melakukan membuat tagihan atas jasa yang telah diterima. Sedangkan fungsi penerimaan kas, bagian administrasi dan keuangan melakukan penerimaan kas dari tagihan yang telah dibuat, serta membuat kuitansi sebagai bukti pembayaran. Dengan adanya sistem baru, proses pembuatan tagihan menjadi lebih mudah. Dan pada proses penerimaan kas menjadi lebih cepat. Karena sistem baru dapat menampilkan piutang secara otomatis. Sehingga bagian administrasi dan keuangan tidak perlu menghitung secara manual.

2. Dokumen dan Catatan Terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Pertama bagian administrasi dan keuangan membuat tagihan. Kemudian surat tagihan diberikan kepada wali siswa. Setelah menerima tagihan, wali siswa akan melakukan pembayaran. Ketika melakukan pembayaran wali siswa akan mendapatkan kuitansi. Ketika menggunakan sistem manual, proses penyusunan laporan piutang dilakukan dengan cara memberi tanda satu per satu pada data siswa yang belum melakukan pembayaran. Data tersebut kemudian disusun menjadi laporan piutang. Pada laporan piutang akan diketahui nama siswa yang menunggak tagihannya.

Dengan adanya sistem baru, bagian administrasi dan keuangan tidak perlu menyusun laporan piutang. Ketika dilakukan *input* pada penerimaan secara otomatis sistem akan menyimpan dan memproses data penerimaan sehingga informasi piutang dapat dihasilkan dengan cepat.

3. Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Dalam sistem informasi akuntansi penjualan pada LPIT Al-Furqan terdapat tiga prosedur yang berkaitan dengan proses penjualan. Pertama adalah prosedur *input* tagihan dilakukan dengan memasukkan nomor tagihan, tanggal pembuatan tagihan, nama siswa, jasa yang diterima dan jumlahnya. Kemudian tagihan tersebut dicetak. Pada proses penerimaan kas, prosedur yang dilakukan adalah melakukan *input* pada penerimaan dengan mengisi nomor kuitansi, tanggal pembuatan kuitansi, nama siswa, tagihan yang dibayar dan jumlah tagihan. Data yang dimasukkan akan secara otomatis tersimpan dalam sistem dan dapat ditampilkan kembali saat diperlukan. Laporan penjualan dan penerimaan kas akan tersusun secara otomatis.

4. Sistem Pengendalian Internal pada LPIT Al-Furqan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa belum ada sistem pengendalian internal terkait dengan sistem penjualan pada LPIT Al-Furqan. Hal ini tidak dimungkinkan karena pemisahan fungsi-fungsi pada sistem penjualan.

5. Tahap Analisis dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis sistem lama adalah metode PIECES. Dari hasil Analisis PIECES diketahui bahwa dari seluruh aspek sistem baru lebih baik jika dibandingkan dengan sistem lama. Aspek tersebut mencakup *performance, information, economy, control, efficeincy, dan service*.

Pada proses analisis sistem ada dua kebutuhan yang perlu dianalisis yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Dari kebutuhan fungsional, sistem baru dapat memenuhi kebutuhan fungsional secara efisien dan akurat. Pada kebutuhan non fungsional, secara teknis perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menjalankan sistem baru mudah untuk didapatkan. Serta proses pengoprasiaannya juga mudah dilakukan.

Analisis berikutnya adalah analisis terhadap kelayakan sistem. Kelayakan yang dianalisis antara lain adalah kelayakan teknis, operasional, hukum dan ekonomi. Sistem baru yang dirancang dapat memenuhi semua aspek pada analisis kelayakan. Pada analisis ekonomi terdapat 3 metode yang digunakan untuk menilai apakah perancangan sistem baru layak atau tidak untuk dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah *payback period, net present value* dan *return on investment*. Perhitungan *payback period* sistem baru menunjukkan investasi perancangan yang akan dilakukan dapat kembali dalam waktu 363 hari, atau setara dengan satu tahun lebih tiga hari. Pada analisis *net present value* diketahui hasil dari perhitungannya adalah positif sebesar Rp. 4.493.524. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem baru layak untuk dijalankan. Hasil analisis *return on investment* juga menunjukkan pengembalian dari investasi sebesar 26,73%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan.

6. Tahap Desain Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Desain pada sistem meliputi desain *database, input* dan *output*. Desain *database* terdiri dari tabel siswa, tabel tagihan, tabel, detail tagihan, tabel jasa, tabel penerimaan. Desain *input* terdiri dari *form login, form* siswa, *form* nama jasa, *form* tagihan. Desain *output* terdiri dari laporan penjualan, laporan piutang, laporan penerimaan kas, laporan daftar siswa.

7. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada LPIT Al-Furqan

Metode konversi implementasi yang digunakan adalah konversi modular. Pada tahap awal dilakukan pengadaan kebutuhan yang digunakan untuk menjalankan sistem baru. Kebutuhan yang perlu diadakan antara lain adalah *hardware*, *software* dan perlengkapan pendukung lainnya. Bagian administrasi dan keuangan akan mendapatkan pelatihan tentang penggunaan *software*. Materi pelatihan difokuskan pada bagaimana cara menjalankan sistem.

Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengguna yang melakukan pengujian sistem ini adalah bagian administrasi dan keuangan. Karyawan bagian administrasi dan keuangan dapat dengan mudah menggunakan sistem baru karena tidak diperlukan keahlian khusus dalam menjalankan sistem ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem informasi akuntansi penjualan pada LPIT Al-Furqan meliputi sistem penjualan kredit dan sistem penerimaan kas. Adanya pengembangan sistem yang baru membuat semua nota tagihan dan kuitansi tercatat dan dapat langsung ditampilkan.

Prosedur penjualan pada LPIT Al-Furqan yaitu prosedur pembuatan tagihan, prosedur penerimaan kas dan prosedur pencatatan penjualan. Berdasarkan analisis PIECES diketahui bahwa sistem baru lebih baik dari semua aspek yang ada.

Pada analisis kelayakan sistem yang meliputi kelayakan teknis, ekonomi, legal, operasional dan sosial, sistem baru akan membantu organisasi dalam pengambilan keputusan. Implementasi yang dilakukan menggunakan metode konversi Modular. Kebutuhan implementasi sistem baru diantaranya pengadaan *hardware*, *software*, dan perlengkapan pendukung sistem.

Saran

1. Pada LPIT Al-furqon perlu dilakukan pengembangan sistem informasi akuntansi selain sistem penjualan seperti sistem pembelian *Point Of Sale (POS)* dan *Payroll* agar sistem yang dimiliki menjadi lebih terintegrasi.
2. Perlunya pengembangan sistem informasi akuntansi penjualan lebih lanjut untuk menghasilkan *software open source* dipasarkan sehingga dapat digunakan organisasi lembaga pendidikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatta, Hanif. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta : ANDI.
- BPS. <https://yogyakarta.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html>. diakses 15 November 2016
- Danny Santoso, Tria Wiradinata. 2016. *Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi pada UD. Sejahtera*. Surabaya Jurnal Informatika dan Sistem Informasi. Vol. 2, No. 1.
- Freddy Rangkuti. 2005. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta
- Anderson dan Lulu. 2015. *Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi pada CV. Riau Jaya*. Jurnal Aksara Komputer Terapan. Vol. 4, No. 1.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Krismiaji, 2005. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Riskiwati. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-obatan Terkomputerisasi yang Efisien dan Efektif pada Perusahaan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 3, No. 7.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerjemah Dewi Fitriyani. Edisi kesembilan, buku dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Sirait, Sutarnan, dan Rahim. 2015. *Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Aktiva Tetap Studi Kasus PT. Sumber Indah Lestari*. Jurnal Sisfotek Global. Vol. 5, No. 2.
- Santoso, D dan Wiradinata. 2016. *Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi pada UD. Sejahtera*. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi Volume 2 No.1 tahun 2016
- Setiadi, AD. 2010. *Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan (Studi Kasus : Kita Market Tegal)*. Jurnal Pro Bisnis Volume 3 No.2 tahun 2010.
- Taufiq, M 2008. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Profesi Akuntan Dan Implikasinya Dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Manajerial September 2008. P3M Amikom.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Fleksibilitas Pada Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017

The Influence of Risk Management Implementation on Financial Flexibility at Commercial Banks on the Indonesia Stock Exchange 2013-2017

Hilda Octavana Siregar^a

Diploma III Akuntansi, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Faridiah Aghadiati Fajri^b

Diploma III Akuntansi, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 9, No. 2, Desember 2018

Halaman : 51 - 62

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

Banking, risk management, financial flexibility, liquidity risk, operational risk, credit risk

JEL classifications :

G32,G21

Contact Author :

^a hilda.octavana.s@mail.ugm.ac.id

^b faridiahgha@ugm.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan resiko manajemen mempengaruhi fleksibilitas keuangan pada bank. Bank merupakan lembaga yang menjaga kestabilan keuangan sebuah negara melalui peran intermediasi. Peran intermediasi adalah peran yang menemukan antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan. Dengan kondisi ini, bank memiliki resiko yang besar karena dampak dari kegagalan dalam pengelolaan dapat mengakibatkan banyak pihak. Resiko-resiko tersebut adalah resiko likuiditas, resiko operasional dan resiko kredit. Dengan memajemen resiko-resiko tersebut perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan dan masalah keuangan. Perusahaan yang terhindar dari masalah keuangan berada dalam kondisi fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan dapat dikatakan ketika perusahaan dapat melakukan berbagai investasi menarik yang mampu mendatangkan pendapatan atau mampu membayar kewajiban sewaktu-waktu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif statistic deskriptif logistic regression. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Dari hasil olahan data penelitian ini menghasilkan bahwa bank-bank di Indonesia pada tahun 2013-2017 yang telah menerapkan manajemen resiko yaitu resiko likuiditas dan resiko kredit dapat mempengaruhi kondisi fleksibilitas keuangan. Sedangkan resiko operasional yang telah diterapkan tidak berpengaruh signifikan terhadap fleksibilitas keuangan.

This study aims to determine the implementation of management risk affecting financial flexibility at banking. Banks are institutions that maintaining the financial stability of a country through an intermediary role. The role of intermediation is the role of finding between parties who have funds and those who need them. Under this condition, banks have a big risk because the impact of failure in management can result in many parties. The risk is liquidity risk, credit risk and operationa risk. Risk management can avoiding bankruptcy and financial problem. Financial flexibility is when companies can make various attractive investments that are able to bring in income or be able to pay obligations at any time. Thi study is quantitative method with statisttic descriptive logistic regression. The data used are bank financial report data listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The research result is implementation risk management can effecting signicantly financial flexibility. But operational risk has no effecting to financial flexibility.

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank, dan akan menciptakan dampak ikutan secara domestik maupun pasar internasional. Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan fungsinya maka perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian (Basel II, 2006). Oleh karena itu, perbankan harus mampu mempertahankan kinerjanya agar dapat menjadi suatu industri yang sehat serta menjaga kestabilan keuangan negara.

Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar 1988 Accord yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko serta memberikan insentif jika terdapat peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari tekanan yang disebabkan oleh risiko kerugian akibat kegagalan operasional. Besarnya resiko yang harus dihadapi industri perbankan menuntut agar melakukan manajemen atas resiko yang ada sehingga tetap menjaga kestabilan perusahaan.

Resiko adalah penyimpangan terhadap pencapaian sesuatu yang bersifat negatif dan harus dihindari. Manajemen resiko berfokus pada hubungan tata kelola terhadap strategi untuk mencapai tujuan yang bersifat menyeluruh termasuk risiko keuangan, sumber daya manusia, insentif dan tata kelola (Rizzi, 2008).

Menurut Darmawi (2011:16-18), ada beberapa risiko yang sering dihadapi bank antara lain: risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah NPL (*NonPerforming Loan*) yaitu perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan bank kepada debitur. Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah indikator yang digunakan untuk risiko likuiditas. LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. LDR dirumuskan dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal bank, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal. Untuk risiko operasional indikator yang digunakan adalah BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan operasional). BOPO menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional). BOPO menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Dengan manajemen resiko-resiko yang ada maka perusahaan menjadi sehat dan keberlangsungannya terjamin. Dengan kesehatan perbankan dapat mendukung kestabilan ekonomi negara. Sehingga perbankan mampu merespon secara positif jika terjadi hal-hal diluar kendali.

Bank harus menganut prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada nasabah, mengatur operasional dan likuiditasnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat dikatakan bank melakukan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko dapat menghindari kondisi negatif yang tidak terduga atau perusahaan mampu melakukan aksi dalam menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Kebangkrutan dapat dihindari jika perusahaan benar-benar dalam kondisi fleksibel di keuangan.

Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk merespon secara efektif atas sesuatu yang tidak terduga terhadap arus kas atau kesempatan berinvestasi dan merupakan penggerak utama dari keputusan struktur modal. (Graham, Harvey (2001), dan Bancel dan Mittoo (2004)). Tujuan dari fleksibilitas keuangan adalah untuk mempertahankan kekuatan utang agar memiliki kemampuan keuangan di masa depan. Sehingga perusahaan dapat menangkap peluang investasi (DeAngelo, DeAngelo, dan Whited, 2008; Graham, 2000) dan meningkatkan nilai perusahaan (Marchica dan Mura, 2010; Arslan Florackis dan Ozkan, 2011).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin mengetahui apakah penerapan manajemen resiko berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Manajemen Resiko Bank

Pengalaman krisis ekonomi yang dialami Indonesia, makin berkembangnya sistem keuangan, serta makin menguatnya interaksi antara sektor ekonomi dan keuangan membawa perubahan pandangan pada sistem keuangan dunia. Suatu kebijakan yang dapat mencegah atau mengurangi potensi terjadinya krisis, baik yang bersumber dari dalam sistem keuangan maupun dari luar sistem keuangan sangat diutamakan. Kebijakan makroprudensial dipercaya oleh otoritas-otoritas keuangan menjadi salah satu cara untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan yang terjaga (Galati G. dan Richhild M., 2011 dan IMF, 2011). Tujuan akhir dari kebijakan makroprudensial adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup: (1) pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi; (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek manajemen risiko di perbankan. Menggunakan berbagai alternatif pendekatan dalam mengukur risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, maka hasilnya adalah perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive capital allocation*). Dalam Basel II, perhitungan modal bank ini dimuat dalam Pilar-1 *Minimum Capital Requirement*. Basel II Pillar 6 dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu pendekatan standar berlaku untuk seluruh bank dan model yang dikembangkan secara internal sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan profil risiko individual bank. Komparasi di antara 2 pendekatan di atas, maka internal model secara umum diharapkan dapat menghasilkan perhitungan kebutuhan modal yang lebih tepat sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Ini akan menjadi insentif bagi bank tersebut. Kondisi ini diharapkan menjadi pemicu bagi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko sehingga pada saatnya dapat mengoptimalkan insentif yang dapat diperoleh dalam menghitung kebutuhan modal.

2. Risiko Likuiditas

Salah satu risiko yang krusial adalah risiko likuiditas. Untuk itu bank harus memiliki suatu kebijakan dan praktek manajemen risiko likuiditas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor serta mengendalikan risiko likuiditas sehingga dapat meminimalisir dampaknya pada tingkat yang dapat ditoleransi (*risk tolerance*).

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank menyediakan dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas merupakan masalah yang sangat penting bagi bank untuk menjaga kontinuitas usahanya. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan mempengaruhi kredibilitas bank karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebagai lembaga yang sumber dana terbesarnya berasal dari masyarakat, bank tidak akan mampu bertahan beroperasi tanpa adanya kepercayaan tersebut. Menurut Ali (2006:402) indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan manajemen risiko likuiditas adalah LDR. LDR mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Syamsuddin (2007:44), mengemukakan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin baik suatu perusahaan, karena semakin tinggi rasio ini berarti jumlah kredit yang diberikan meningkat sehingga menyebabkan pendapatan bunga dan laba yang diterima meningkat, akhirnya ROA dan ROE pun ikut meningkat. Selanjutnya, Muljono (2002:127) mengungkapkan bahwa LDR yang rendah akan mengakibatkan bank dalam keadaan likuid sehingga menyebabkan idle fund akibatnya profitabilitas (ROA dan ROE) rendah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/2010, menetapkan LDR bank umum berada pada kisaran 78-100%. Apabila LDR berada dibawah ketentuan BI menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, LDR yang berada diatas 100% menunjukkan kredit yang disalurkan melebihi dari dana yang dihimpun sehingga bank akan mengalami kekurangan dana untuk mencukupi kewajibannya.

Menurut Ali (2006:402) indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan manajemen risiko likuiditas adalah LDR. LDR mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Syamsuddin (2007:44), mengemukakan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin baik suatu perusahaan, karena semakin tinggi rasio ini berarti jumlah kredit yang diberikan meningkat sehingga menyebabkan pendapatan bunga dan laba yang diterima meningkat, akhirnya ROA dan ROE pun ikut meningkat. Selanjutnya, Muljono (2002:127) mengungkapkan bahwa LDR yang rendah akan mengakibatkan bank dalam keadaan likuid sehingga menyebabkan idle fund akibatnya profitabilitas (ROA dan ROE) rendah.

Dengan demikian, bank harus benar-benar memprioritaskan pengelolaan likuiditasnya secara hati-hati sehingga kegagalan usaha akibat salah mengelola likuiditas sedapat mungkin dihindari yaitu dengan menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efektif melalui penetapan limit internal, pemeliharaan alat likuid yang cukup, serta perbaikan pengendalian intern.

3. Risiko Kredit

Resiko kredit disebut juga resiko kebangkrutan nasabah. Risiko ini meningkat seiring dengan jumlah pelanggan, jumlah pinjaman yang diberikan dan tingkat suku bunga. Dalam mengelola risiko ini, bank mengikuti persiapan dan analisis dokumen pinjaman, menetapkan aturan untuk pembagian risiko dan mencari diversifikasi portofolio pinjaman. Maka, untuk mencegah gagal bayar yang terjadi pada nasabah bank harus melakukan monitoring terhadap nasabah.

Pemantauan kredit dilakukan oleh petugas kredit dengan cara praktis berdasarkan jadwal di tingkat cabang, yang ditetapkan oleh komite kredit. Pemantauan pinjaman harus dilakukan setiap bulan atau kapan pun diperlukan, yaitu setiap kali ada informasi, situasi ekonomi dan keuangan pelanggan memiliki kecenderungan menurun.

Basel II memungkinkan lembaga keuangan untuk menghitung risiko kredit untuk memenuhi ketentuan permodalan dengan menggunakan salah satu dari dua cara yaitu *Standardised Approach (SA)*, bank menggunakan daftar pembobotan risiko dalam perhitungan risiko kredit dari aset-aset bank dan *Internal Rating-Based Approach (IRB)* dengan mengizinkan bank untuk menggunakan peringkat internal mereka terhadap lawan dan eksposur yang dimiliki yang memungkinkan pembedaan risiko yang lebih rinci dari berbagai eksposur sehingga menghasilkan tingkat permodalan yang lebih sesuai dengan tingkatan risiko yang dihadapi.

4. Risiko Operasional

Basel Committee on Banking Supervision, dalam *Basel II Accord*, mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak memadai atau gagal, orang dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Menurut definisi ini risiko operasional termasuk risiko hukum, tetapi tidak termasuk risiko strategis dan reputasi. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi, maka perbankan wajib menerapkan manajemen risiko operasional agar risiko tersebut bisa dideteksi, dikendalikan dan diatasi kemunculannya.

Menurut SEBI No.5/21/DPNP/2003, proses penerapan manajemen risiko operasional adalah melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi bank.

5. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam merespon perubahan yang berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Perubahan yang dimaksud dapat merupakan kesempatan untuk mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang atau mencegah hal buruk terjadi pada perusahaan. Ketika perusahaan berada pada kondisi *financial flexible* dapat dikatakan perusahaan akan mampu memilih berbagai alternatif yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Dan dapat dikatakan perusahaan tidak sedang dalam *financial distress*. Isu tentang fleksibilitas keuangan menjadi hal yang menarik sejak adanya survey yang dilakukan oleh Graham dan Harvey (2001) terhadap *Chief Finance Officer (CFO)* dari berbagai perusahaan di Amerika dan 392 diantaranya mengatakan bahwa fleksibilitas keuangan merupakan faktor penentu yang paling penting dalam penentuan komposisi struktur modal. Dengan kondisi struktur modal yang optimal perusahaan dapat menghemat pajak dari bunga serta menurunkan pembayaran biaya modal kepada pemegang saham.

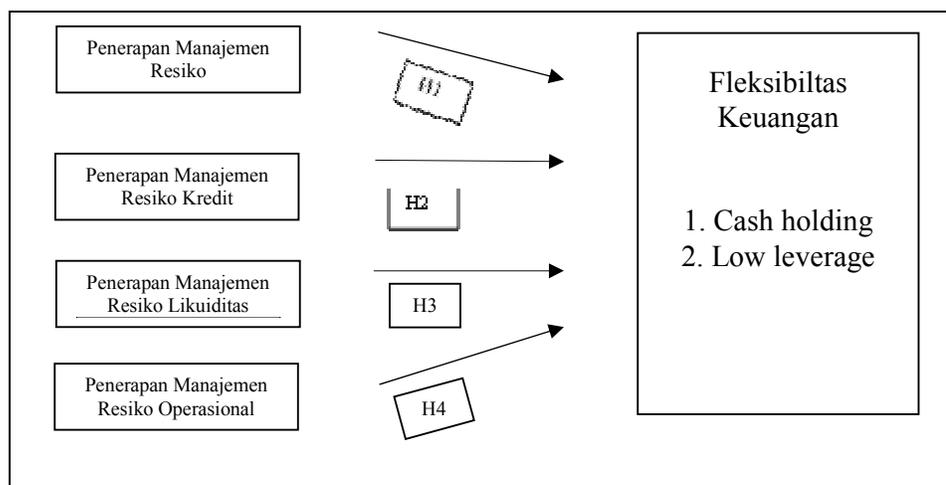
Menurut Daniel et al. (2010) fleksibilitas keuangan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk merespon secara tepat dan tetap memaksimalkan nilai perusahaan jika sewaktu-waktu perubahan yang tidak diharapkan dalam arus kas dan jika adanya kesempatan untuk berinvestasi, dalam kondisi perekonomian yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi secara pasti yang dipengaruhi oleh kemampuan suatu perusahaan untuk berhutang dan *cash holding* yang optimal. Ketidakpastian menjadi penyebab mengapa perusahaan harus berada pada kebebasan keuangan serta melakukan manajemen berbagai risiko. Dengan melakukan manajemen risiko yang merupakan salah satu aktivitas dalam mengendalikan ketidakpastian maka kondisi kebebasan keuangan dapat terwujud.

Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan suatu fenomena yang terjadi diluar perencanaan yang diprosikan dengan rasio leverage merupakan faktor yang paling mempengaruhi fleksibilitas keuangan (Arslan et al., 2010). Rasio leverage adalah rasio yang mengukur tingkat penggunaan utang perusahaan melalui besarnya pembayaran bunga utang tersebut. Maka ketika rasio leverage perusahaan tinggi tingkat

kebebasan keuangan menjadi rendah. Karena adanya kewajiban biaya tetap yang harus dibayar perusahaan.

Bancel dan Mittoo (2011) melakukan penelitian saat krisis global di tahun 2008 dimana banyak perusahaan mengalami kebangkrutan pada masa krisis tersebut, karena tidak memperhitungkan fleksibilitas keuangan yang disebabkan oleh rasio leverage, rasio likuiditas, dan kemampuan perusahaan untuk berhutang. Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam kondisi perekonomian yang normal, perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi. Namun dimasa resesi, dimana penjualan dapat merosot tajam dan menyebabkan kas akan menyusut, sehingga kemungkinan perusahaan perlu mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan oprasionalnya. Pada masa resesi umumnya para kreditur akan meningkatkan tingkat suku bunga mereka dikarenakan adanya peningkatan resiko kerugian, hal ini dapat memberikan beban bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikatakan sebaiknya suatu perusahaan mengatur proporsi utangnya dengan baik sehingga tetap memiliki fleksibilitas keuangan ketika terjadi krisis. Fenomena ini menunjukkan bahwa menjaga fleksibilitas keuangan merupakan hal perlu dipertimbangkan guna meningkatkan daya survival pada suatu perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut penelitian ini menggunakan proksi dalam menentukan fleksibilitas keuangan yaitu *low leverage* and *high cash holdings*. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka rumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko secara simultan berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penerapan manajemen risiko likuiditas berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Penerapan manajemen risiko operasional berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan laporan keuangan 5 tahun yaitu 2013-2017. Dari populasi ini jika perusahaan terdaftar sepanjang tahun tersebut maka digunakan sebagai objek penelitian ini. Perusahaan perbankan dalam penelitian ini sebesar 45 perusahaan yang kemudian dianalisis tingkat penerapan manajemen resiko dan fleksibilitas keuangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Dimana pendekatan ini terdiri atas perumusan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisa hasil dan mengimplementasikan hasil” (Kuncoro, 2001:1-9).

Jenis Operasional Variabel

Fleksibilitas keuangan

Dalam penelitian ini fleksibilitas merupakan variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Perusahaan berada di kondisi fleksibilitas keuangan dengan dua cara yaitu leverage yang rendah dan kas yang ditahan tinggi. Rata-rata perhitungan leverage adalah Total Utang/Total Aset, sedangkan kas ditahan adalah (Dana Moneter+Aset Keuangan yang diperdagangkan)/ Total Aset. Kemudian dibandingkan dengan masing-masing perusahaan di industri. Leverage yang rendah adalah setengah dari leverage industri dan kas yang ditahan tinggi adalah 1,5 kali dari industri. Untuk menghindari pengaruh kontinjensi rasi ini diobservasi minimal selama 2 tahun. Disimbolkan dengan LL(Leverage Rendah) and HCH(Kas yang ditahan tinggi) (Arslan, Florackis and Ozkan, 2011).

Variabel Independen

Penerapan Manajemen Resiko Kredit

Manurut Madjid 2015 berdasarkan SEBI No.5/21/2003 penerapan manajemen risiko kredit (Diproksi dengan NPL) yang merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dilakukan bank sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko kredit yang digunakan sebagai parameter dalam mengukur penerapan manajemen risiko kredit salah satunya adalah NPL, yang menunjukkan perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPL yang ditentukan Bank Indonesia sebesar 5%. Artinya jika bank memiliki MPL diatas ketentuan Bank Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi yang tidak baik karena kemungkinan pengembalian pinjaman dari nasabah semakin besar.

Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas menunjukkan seberapa besar jumlah simpanan yang dapat dikumpulkan untuk mendukung pinjaman yang akan dicairkan yang diproksikan dengan Loan Deposit Ratio (LDR. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwasuatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau reaktif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan (Latumaerissa, 1999:23). LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rumus dalam menghitung LDR sebagai berikut:

Penerapan Manajemen Resiko Operasional

Resiko operasional pada bank mengukur tingkat efisiensi operasional yang diprosikan melalui BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Belanja operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi (<https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/makna-car-roa-ldr-dan-bopo/>) diakses tanggal 1 oktober 2018 jam 15.08 WIB. Rumus yang digunakan dalam menghitung BOPO sebagai berikut:

Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode statistik deskriptif dan regresi logistik panel data laporan keuangan bank yang terbit di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun yang diolah dengan program SPSS. Laporan bank yang tersedia selama 5 tahun dianalisis ukuran-ukuran resiko manajemen yang diprosikan dengan NPL, LDR dan BOPO dalam menentukan variabel independen. Sedangkan data dependen diprosikan dengan *low leverage* dan *high cash holding*. Data-data tersebut diolah menggunakan regresi logistik. Regresi logistik mirip dengan regresi linier yaitu mencoba untuk mencocokkan garis (sebuah intersepsi dan kemiringan) ke data dengan model regresi yang memiliki dua level (Sainani, 2011). Model dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan: Y: Fleksibilitas Keuangan (LL dan HCH)

i: Bank t: Tahun

α : Konstanta/Intercept

β : Koefisien Regresi

X1: Penerapan manajemen risiko kredit

X2: Penerapan manajemen risiko likuiditas

X3: Penerapan manajemen risiko operasional

e : Tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Dalam pengolahan data menggunakan regresi logistik menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Omnibus Tests and R Squared

Test ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas atau minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas.

2. Hosmer and Lemeshow Test

Berbeda dengan omnibus test, nilai hosmer and lemeshow test justru dikatakan baik jika nilai signifikannya > 0.05 .

3. Uji Parsial Pembentukan Model

Tes ini dilakukan untuk menguji bagaimana tes hubungan antara variabel independen dengan dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah deskripsi data yang diperoleh dari hasil penelitian

Tabel 1. Descriptive Statistics

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BOPO	175	100,0%	0	0,0%	175	100,0%
LDR	175	100,0%	0	0,0%	175	100,0%
NPL	175	100,0%	0	0,0%	175	100,0%
FF	175	100,0%	0	0,0%	175	100,0%

Sumber: data diolah

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
BOPO	175	860102004 6,00000	-901884362, 00000	7699135684 ,00000	1525432864 60,57928	871675922, 6318816	67465552,6 1291489	892485371, 38658330	7965301381 39047680,0 00
LDR	175	,88232	,01707	,89939	133,43722	,7624984	,00767931	,10158767	,010
NPL	175	87,83610	,15890	87,99500	3684,60290	21,0548737	1,41555455	18,7260265 9	350,664
FF	175	1	0	1	37	,21	,031	,409	,168
Valid N (listwise)	175								

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan manajemen resiko kredit yang diukur dengan rasio NPL memiliki rentang nilai 0,15890 hingga 87,99500 yang memiliki nilai rata-rata 21,0548737 dan standar deviasi 18,72602659
2. Bahwa penerapan manajemen resiko likuiditas yang diukur dengan rasio LDR memiliki rentang nilai 0,01707 hingga 0,89939 yang memiliki nilai rata-rata 0,7624984 dan standar deviasi 0,10158767
3. Bahwa penerapan manajemen resiko operasional yang diukur dengan rasio BOPO memiliki rentang nilai -0,901884362 hingga 7699135684 dengan nilai rata-rata 871675922,63 dan standar deviasi 892485371,38

2. Uji Signifikansi Model

Tabel 3. Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	17.870	3	.000
	Block	17.870	3	.000
	Model	17.870	3	.000

Tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas atau minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Dapat dilihat dengan menggunakan nilai p-value, dimana menunjukkan angka 0.000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi uji sebesar 0.05 sehingga kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Dengan demikian, maka dengan tingkat kepercayaan 90% dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Ini menunjukkan bahwa dari ketiga penerapan manajemen resiko (kredit, likuiditas dan operasional) terdapat salah satu yang berpengaruh signifikan terhadap fleksibilitas keuangan.

Hasil dari tes ini dapat menerima hipotesis bahwa penerapan manajemen risiko secara simultan berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 4. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	55.609 ^a	.112	.290

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 5. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.114	8	.745

Dari hasil tes Hosmer dan Lemeshow dengan nilai 0,745 dimana lebih besar dari 0,05 artinya bahwa model regresi logistik mampu menjelaskan data dan tidak terdapat perbedaan antara model dan nilai observasinya. Sehingga persamaan logistik dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3. Uji Parsial dan Pembentukan Model

Tabel 6. Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	NPL	-.723	.372	3.782	1	.052	.486
	LDR	12.996	7.059	3.389	1	.066	440848.190
	BOPO	.266	.749	.126	1	.722	1.305
	Constant	-11.991	5.822	4.242	1	.039	.000

a. Variable(s) entered on step 1: NPL, LDR, BOPO.

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa terdapat 2 variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan karena masing-masing variabel tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari $\alpha=10\%$. Variabel-variabel tersebut adalah NPL (Sig.=0,052) dan LDR (Sig=0,66). Sedangkan untuk variabel BOPO secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan, maka yang dimodelkan dan interpretasikan hanya variabel NPL dan LDR. Tetapi, perlu kita ketahui bahwa variabel jenis kelas ini dikatakan tidak signifikan secara statistik, bukan berarti pengaruhnya tidak ada (nol rasio), melainkan ada pengaruhnya, hanya saja sangat kecil. Untuk penelitian selanjutnya (beda waktu, beda tempat atau lereng) bisa saja hasilnya akan signifikan. Model penelitian yang dapat diajukan menjadi:

$$Y = -11,991 - 0,723 \text{ NPL} + 12,996 \text{ LDR} + 0,266 \text{ BOPO} \quad (2)$$

Dari model yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) X1 yaitu NPL

Nilai koefisien variabel X1 adalah -0.723. Nilai signifikansi variabel X1 adalah 0,052 yang lebih kecil dari $\alpha=0,10$. Maka variabel X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fleksibilitas keuangan. Penerapan manajemen resiko kredit dapat menurunkan fleksibilitas keuangan perbankan. Hasil ini dari penelitian ini dapat menerima hipotesis kedua yaitu penerapan manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b) X2 yaitu LDR

Nilai koefisien variabel X2 adalah 12,996. Nilai signifikansi variabel X2 adalah 0,066 yang lebih kecil dari $\alpha=0,10$. Maka variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap fleksibilitas keuangan. Dapat diartikan dengan menerapkan manajemen resiko likuiditas akan meningkatkan fleksibilitas keuangan perbankan secara signifikan. Semakin besar rasio LDR semakin besar juga fleksibilitas keuangan perbankan. Hasil ini dari penelitian ini dapat menerima hipotesis ketiga yaitu penerapan manajemen risiko likuiditas berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c) X3 yaitu BOPO

Nilai koefisien variabel X3 adalah 0.266. Nilai signifikansi variabel X3 adalah 0,722 yang lebih besar dari $\alpha=0,10$. Maka variabel X3 berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan namun tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan menerapkan manajemen resiko operasional tidak akan berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan yang artinya menolak hipotesis ke empat yaitu penerapan manajemen risiko operasional berpengaruh terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen resiko terhadap fleksibilitas keuangan. Tidak hanya terbebas dari kebangkrutan serta masalah keuangan dengan berada di fleksibilitas keuangan perbankan dapat memilih tawaran investasi yang menarik sewaktu-waktu dan membayar kewajiban sesuai dengan jatuh tempo. Hal ini menarik dikarenakan bank merupakan institusi yang ikut menjaga keuangan negara. Dalam menerapkan manajemen resiko dibutuhkan pengroana materi dan non materi. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen resiko baik secara simultan mempengaruhi fleksibilitas keuangan. Sedangkan secara parsial penerapan manajemen resiko kredit dan likuiditas mempengaruhi fleksibilitas keuangan secara signifikan sedangkan penerapan manajemen operasional tidak mempengaruhi fleksibilitas keuangan.

Saran

Penelitian-penelitian terdahulu hanya membahas fleksibilitas keuangan dan investasi atau manajemen resiko dengan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian yang membahas tentang kedua variabel ini masih sangat jarang dilakukan. Sehingga dalam kajian teori belum bisa disajikan secara maksimal, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah periode penelitian serta menggunakan bank secara internasional agar hasil dari penelitian dapat digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Kuncoro. 2001. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik*, Cetakan Pertama. Bandung: ALFABETA.
- Ali, M., 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basel Committee on Banking Supervision. 2006., “*Corporate governance principles for banks*”, *Basel Committee on Banking Supervision*, Basel, available at: www.bis.org/bcbs/publ/d328.htm.
- Bancel, U.R. Mittoo. 2004. *The determinants of capital structure choice: a Survey of European firms*[J]. *Financial Management*,33:103-132.
- Daniel, Naveen D., David, Danie.l, Naveen, Denis. 2010. *Sources of financial flexibility: Evidence from cash flow shortfalls*.
- Darmawi, H. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Galati, G., and Richhild M.2010. “*Macroprudential Policy – a Literature Review*,” BIS Working Paper No. 337. Bank for International Settlements.
- H. DeAngelo, L. DeAngelo, T. M. Whited. 2008. *Capital structure dynamics and transitory debt*[DB], Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1262464>.
- H. DeAngelo, L. DeAngelo.2007. *Capital structure, payout policy and financial flexibility*[DB]. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=916093>.
- J. Graham. 2000. *How big are the tax benefit of debt*[J]. *Journal of Finance*,,55:1901-1942.
- Brigham dan Houston. 2006. Salemba Empat, Jakarta
- M. Marchica, R. Mura. 2010. *Financial flexibility, investment ability, and firm value: evidence from firms with spare debt capacity*[J]. *Financial Management*, Winter:1339 – 1365.
- Mulyono dan Teguh. 2001. *Analisis Laporan Keuangan untuk Perbankan*. Edisi Kelima. BPFE – UGM, Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 19 /PBI/2010 Tentang sGiro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
- Ö. Arslan, C. Florackis, A. Ozkan. 2011. *Financial flexibility, corporate investment and performance: evidence from east Asian firms*[DB]. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1234682>.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/2003, Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank.
- Rizzi, Joseph V. 2008. *Rethinking Risk Management—Again*. *Commercial Lending Review*.
- Syamsuddin, L., 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/makna-car-roa-ldr-dan-bopo/>) diakses tanggal 1 oktober 2018 jam 15.08 WIB

EBBANK
Jurnal Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan

ISSN : 2442-4439 (Online)

ISSN : 2087-1406 (Print)

Pengajuan Paper/Artikel: Pengajuan artikel atau paper pada EBBANK dapat disampaikan melalui sistem penyampaian on-line kami. Pertanyaan tentang Journal dipersilahkan melalui email yang tertera di bagian akhir halaman ini. Instruksi mengenai gaya dan tata tulis naskah yang akan disampaikan dapat ditemukan pada jurnal online EBBANK. Instruksi dan gaya penulisan saat ini menggunakan contoh pola yang bias langsung di edit dan di tulis pada file yang diberikan. Instruksi mengenai tata tulis tidak diberikan di jurnal versi cetak.

Disclaimer: Penerbit, pengelola jurnal, dan para editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang dikemukakan tidak mencerminkan pandangan dari Penerbit, pengelola jurnal, maupun para editor.

Informasi Penerbitan: EBBANK terbit 2 (dua) kali per tahun setiap bulan Juni dan Desember. Permintaan versi cetak dapat disampaikan melalui email yang tertera di bagian akhir halaman ini. Versi digital jurnal EBBANK dapat diunduh secara gratis pada www.ebbank.stiebbank.ac.id.

Penerbit: EBBANK diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan (STIEBBANK) Yogyakarta.

Alamat Redaksi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan (STIEBBANK) Yogyakarta, JIMagelang KM 8 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285 Telefon: 0274-866800.

Contact person:

Agus Setyowidodo; email: astyo318@gmail.com

E B B A N K

